

**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI SISWA
SMP NEGERI 2 PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**SEPTI AYUNINGSIH
NIM. 1423303066**

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Septi Ayuningsih

NIM : 1423303066

Jenjang : S-I

Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI SISWA SMP NEGERI 2 PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 April 2019

Saya yang menyatakan,



Septi Ayuningsih

NIM. 1423303066



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto
Telp : 0281-635624, 628250, Fak. 0281-636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN
KARAKTER BAGI SISWA SMP NEGERI 2 PURWOKERTO KABUPATEN
BANYUMAS

Yang disusun oleh: Septi Ayuningsih, NIM : 1423303066, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari : Rabu, tanggal 26 Juni 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada sidang Dewan Penguji skripsi.

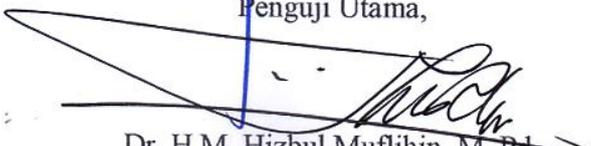
Penguji I/Ketua sidang/Pembimbing,

Penguji II/Sekretaris Sidang,


Dr. Novan Ardy Wiyani, M. Pd.
NIP.: 19850525 201503 1 004


Toifur, S. Ag., M. Si.
NIP.: 19721217 200312 1 001

Penguji Utama,


Dr. H.M. Hizbul Muflihah, M. Pd.
NIP.: 19630302 199103 1 005

Mengetahui :

Dekan,


Dr. H. Suwito, M. Ag
NIP.: 19710424 199903 1 002



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan FTIK IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Septi Ayuningsih, NIM: 1423303066 yang berjudul:

**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
PENDIDIKAN KARAKTER BAGI SISWA SMP NEGERI 2
PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan FTIK IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan (S.Pd.).

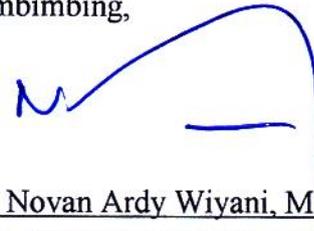
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 April 2019

Pembimbing,



Dr. Novan Ardy Wiyani, M. Pd. I.
NIP. 19850525 201503 1 004

MOTTO

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ¹

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau memperskutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.””(Q.S Al Luqman: 13).

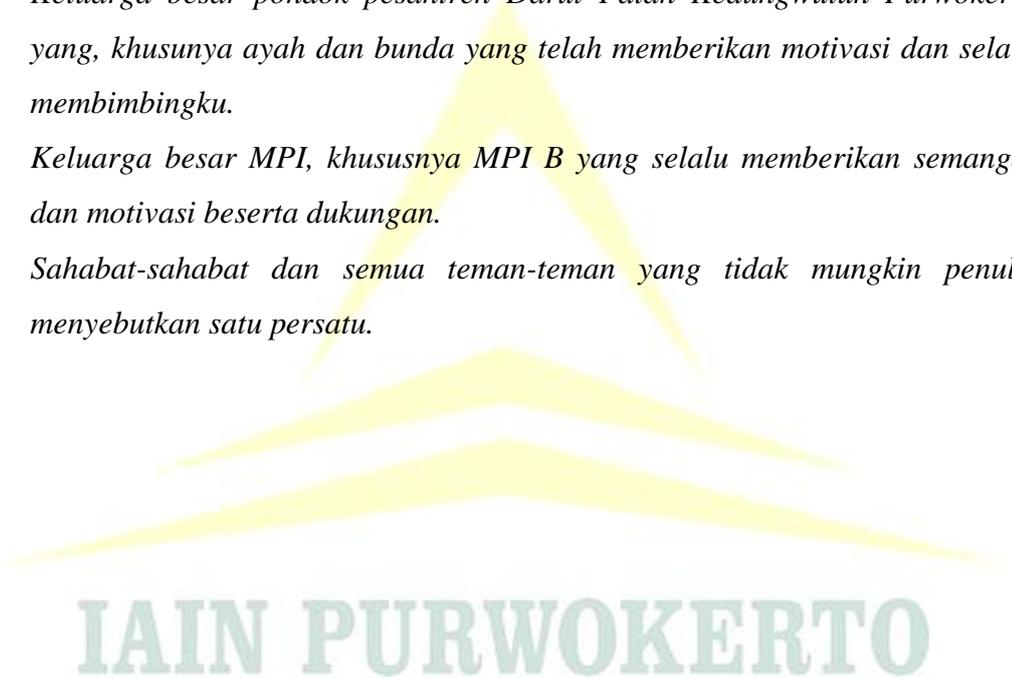


¹ (Q.S Al Lukman: 13)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

1. *Ibu dan bapak tercinta, yang merupakan motivator terbesar dalam hidupku yang selalu mendo'akan dan selalu menyayangiku, atas pengorbanan serta kesabaranmu yang mengantarkanku ke sini. Tak pernah cukup ku membalas cinta dan kasih sayang ibu dan bapak padaku.*
2. *Adik-adik tercinta, yang telah memotivasiku dan selalu menyemangatiku.*
3. *Keluarga besar pondok pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto yang, khususnya ayah dan bunda yang telah memberikan motivasi dan selalu membimbingku.*
4. *Keluarga besar MPI, khususnya MPI B yang selalu memberikan semangat dan motivasi beserta dukungan.*
5. *Sahabat-sahabat dan semua teman-teman yang tidak mungkin penulis menyebutkan satu persatu.*



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Bagi Siswa SMP Negeri 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas”. Walaupun dalam penyusunan skripsi masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari isi maupun yang telah disesuaikan dengan sistematika pembuatan skripsi yang telah ditentukan.

Selanjutnya penulis juga menyadari bahwa skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Suwito, M. .Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Suparjo, MA, Wakil Dekan I FTIK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Subur, M. Ag., Wakil Dekan II FTIK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Sumiarti, M. Ag. Wakil Dekan III FTIK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Rahman Afandi, M.S.I., Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Drs. H. Asdlori, M.Pd.I., selaku Penasehat Akademik Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI B Angkatan 2014)

8. Dr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Segenap guru dan staf administrasi SMP Negeri 2 Purwokerto yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan data-data dokumentasi.
11. Bayu Heryanto, S.Pd., selaku kepala sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
12. Segenap guru dan karyawan SMP Negeri 2 Purwokerto.
13. Ibu dan Bapak yang telah memberikan dukungan secara moril, materil, dan yang selalu mendoakan, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Adik-adik saya yang selalu memberikan semangat, dukungan dan menginspirasi dalam menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman MPI angkatan 2014 yang selalu memberikan motivasi agar cepat dalam menyelesaikan skripsi. Dan khususnya kelas MPI B.
16. Pengasuh pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman dari Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 24 April 2019

Penulis,



Septi Ayuningsih

NIM. 1423303066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kebijakan Pendidikan	13
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan	13
2. Manfaat dan tujuan Kebijakan Pendidikan	16
3. Karakteristik Kebijakan Bidang Pendidikan	18
4. Landasan kebijakan Pendidikan.....	20
5. Pendekatan Kebijakan Bidang Pendidikan	22
6. Tahapan-Tahapan Kebijakan	24
7. Kebijakan Pendidikan Sebagai Bagian Kebijakan Publik	26
B. Pendidikan Karakter.....	27
1. Pengertian Pendidikan Karakter.....	27
2. Fungsi Pendidikan Karakter.....	30

3.	Tujuan Pendidikan Karakter	30
4.	Prinsip Pendidikan Karakter	31
5.	Nilai Pendidikan Karakter.....	32
6.	Strategi Pendidikan Karakter	34
C.	Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter	36
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian.....	42
B.	Lokasi Penelitian	42
C.	Objek dan Subjek Penelitian	42
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	44
E.	Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER		
A.	Gambaran Umum SMP Negeri 2 Purwokerto.....	48
1.	Profil Sekolah.....	48
2.	Sejarah SMP Negeri 2 Purwokerto	48
3.	Visi dan Misi	52
4.	Struktur Organisasi.....	54
5.	Keadaan Siswa	55
6.	Keadaan Guru dan Karyawan	55
7.	Keadaan Sarana dan Prasarana.....	57
8.	Prestasi SMP Negeri 2 Purwokerto.....	58
B.	Penyajian Data.....	59
1.	Formulasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto	59
2.	Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto	61
3.	Evaluasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto	65
4.	Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto	65
C.	Analisis Data	67
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	73

B. Saran-Saran	74
C. Kata Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Siswa di SMP Negeri 2 Purwokerto	55
Tabel 2 Kualifikasi Pendidikan.....	56
Tabel 3 Jumlah Guru Dengan Tugas Mengajar Sesuai Dengan Latar Belakang Pendidikan.....	57
Tabel 4 Sarana Dan Prasarana di SMP Negeri 2 Purwokerto.....	58
Tabel 5 Peringkat UN Kabupaten 5 Tahun Terakhir	58



**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
PENDIDIKAN KARAKTER BAGI SISWA SMP NEGERI 2
PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS**

Septi Ayuningsih
1423303066

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Kebijakan kepala sekolah adalah suatu hasil keputusan yang dibuat secara bijaksana oleh kepala sekolah untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah bertanggungjawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk bisa mendapatkan gambaran terkait pendidikan karakter, mengetahui program serta pelaksanaannya dan mengetahui faktor-faktor serta bagaimana mengupayakan perbaikan dari hambatan di SMP Negeri 2 Purwokerto.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto, Waka Kurikulum, Guru PKN.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan kepala sekolah di SMP Negeri 2 Purwokerto dalam meningkatkan pendidikan karakter merupakan program-program yang disaring dari pendapat guru-guru dan siswa. 2) SMP Negeri 2 Purwokerto memiliki program-program unggulan yaitu Peningkatan nilai Ujian Nasional (UN) dengan target 90,20, tahfidz Qur'an, pengembangan 5 bahasa asing (Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris), bimbingan TOEFL untuk kelas IX. 3) untuk evaluasi yaitu dengan adanya apel pagi yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Apel pagi ini berfungsi untuk mengetahui apakah program-program atau kegiatan-kegiatan (akademik atau non akademik) berjalan dengan baik tanpa hambatan. Apel pagi merupakan evaluasi kegiatan dihari sebelumnya dengan tujuan sebagai informasi dan pembinaan.

Kata Kunci : Kebijakan Kepala Sekolah, Pendidikan Karakter, SMP Negeri 2 Purwokerto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan keimanan. Puncak pendidikan adalah tercapainya titik kesempurnaan kualitas hidup.² Pendidikan membimbing manusia menjadi manusiawi yang makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial, dalam konteks ini pendidikan merupakan pemeliharaan budaya. Dalam konteks perubahan yang begitu cepat dewasa ini, pendidikan ini tidak cukup berperan sebagaimana telah diuraikan, tetapi juga harus mampu melakukan transformasi nilai dan tataran instrumental, sesuai dengan tuntutan perubahan dengan tetap menjadikan nilai dasar sebagai fondasi.³

Ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 ayat (1), yaitu:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dari proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”⁴

Sistem persekolahan di Indonesia merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam spektrum kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah.⁵ Suatu kebijakan dikeluarkan pasti menyatu dengan kepentingan

²Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 241.

³ Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah (Konsep dan Praktik Implementasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 37.

⁴ Husaini Usman, *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 7.

⁵ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan; Konsep Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 102.

pemerintah, masyarakat dan ke arah mana kebijakan itu dituju. Begitu pula dengan kebijakan pendidikan diadakan.⁶

Pencapaian tujuan pendidikan juga didasarkan pada manajemen yang baik. Aturan-aturan yang diciptakan untuk dapat mengatur tiap personil sekolah dalam pencapaian tujuan. Pengkodean ataupun rekaman proses aktivitas pembelajaran dapat digunakan untuk mengadakan evaluasi. Rekaman proses tersebut akan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan menuju pencapaian tujuan pendidikan. Beberapa hal tersebut merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan.⁷

Pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan faktor yang paling pokok dalam melaksanakan dan mewujudkan tujuan pendidikan. Dengan kata lain keberhasilan suatu pendidikan ditentukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan disuatu lembaga sekolah yang bertanggung jawab penuh terhadap sekolah yang dipimpin. Maju mundurnya sekolah sangat ditentukan oleh kepala sekolah dituntut untuk dapat memiliki keahlian dan kemampuan, baik kemampuan yang berkaitan dengan kepemimpinan maupun manajemen.⁸ Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah.⁹

Pendidikan selama beberapa dekade belakangan ini bertumpu hanya pada aspek intelektualitas. Hal ini tampak pada berbagai kasus remaja yang diangkat oleh media massa, seperti tawuran siswa, kecurangan dalam pelaksanaan UN, penggunaan Napza, dan pergaulan bebas. Penelitian mutakhir dan realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa penguasaan intelektual tidak menjadi faktor tunggal dalam menunjang kesuksesan seseorang. Aspek kecerdasan emosi dan spiritual justru lebih besar pengaruhnya terhadap kebahagiaan dan keberhasilan seseorang. Disinilah tampak pengaruh dari pendidikan karakter.

⁶ Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*, ..., hlm. 252.

⁷ Rohmat, *Kepemimpinan Pendidikan Konsep Dan Aplikasi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 39.

⁸ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 153.

⁹ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*, ..., hlm. 117.

karakter suatu bangsa berperan besar dalam mempertahankan eksistensi, kemandirian, dan kemerdekaanya. Setiap warga bangsa, terutama generasi muda Indonesia, harus membangun kembali karakter dan kemandirian.¹⁰

Sumber daya sekolah menyangkut peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, program pendidikan, sarana/prasarana, biaya atau keuangan, informasi, proses belajar-mengajar, lingkungan, *output* dan *outcome*, serta hubungan kerja sama dengan *stakeholders*, dan lain-lain. Manajemen pendidikan karakter adalah strategi yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan karakter yang diselenggarakan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai luhur untuk mewujudkan misi sosial sekolah kegiatan manajemen.¹¹

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran dan kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.¹²

Pendidikan karakter dinilai berhasil apabila anak telah menunjukkan habit atau kebiasaan berperilaku baik. Hal ini tentu saja memerlukan waktu, kesempatan, dan tuntutan kontinyu. Perilaku berkarakter tersebut akan muncul, berkembang, dan menguat pada diri anak hanya apabila anak mengetahui konsep dan ciri-ciri perilaku berkarakter, merasakan dan memiliki sikap positif terhadap konsep karakter yang baik serta terbiasa melakukannya. Oleh karena itu pendidikan karakter harus ditanamkan melalui cara-cara yang logis, rasional, dan demokratis.¹³

Peningkatan kepuasan kerja dan kinerja personel sekolah membantu organisasi berubah lebih mudah dan lebih dalam penyesuaian tuntutan

¹⁰ Novan Ardy Wiyani, *Membumikan Pendidikan Karakter Di SD; Konsep, Praktek, Dan Strategi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 73-75.

¹¹ Novan Ardy Wiyani, *Manajemen Pendidikan Karakter; Konsep Dan Implementasinya Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), hlm. 48-49.

¹² Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 84.

¹³ Arismantoro, *Character Building Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter?*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 26-27.

perkembangan siswa maupun lembaga pendidikan. Fenomena kelas-kelas RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional) merupakan budaya adaptif terhadap lajunya peradaban. Fenomena tersebut dibutuhkan figur pemimpin pendidikan yang inovatif dan kreatif.¹⁴

Kepemimpinan di SMP Negeri 2 Purwokerto yaitu sangat sentral terutama dalam merumuskan langkah-langkah pengembangan karakter. SMP Negeri 2 Purwokerto menjadi piloting proyek sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan syarat piloting proyek yaitu Sekolah bertaraf Nasional dan bukan cuma SSN tapi ada plusnya artinya di SSN itu di tiap tiap sekolah ada dan disekolah ini memiliki RSBI. Pembiasaan di sekolah yang kaitannya membentuk karakter siswa sejalan dengan visi misi sekolah, visi nya yaitu beriman, unggul, modern, berwawasan Internasional. Dalam visi misi yang pertama yaitu beriman menjadi titik tekan pengembangan karakter siswa di SMP Negeri 2 Purwokerto.

Jadi kepala sekolah harus menyusun program-program yang akan dilaksanakan. Program-program yang sudah dilakukan misalnya adalah Tadarus Al Qur'an selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai setiap pagi, kemudian bersalaman, literasi (membaca buku), *English Afternoon*, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu Nasional setelah pulang sekolah. Program karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto yaitu program pembiasaan di rumah, misalnya anak-anak diberi semacam angket untuk mengisi tiap hari, angket tersebut dipantau yang bekerja sama dengan orang tua, jadi hal nya dilakukan agama masing-masing, dan orang tua berperan aktif. Jadi di SMP Negeri 2 Purwokerto selalu dilaksanakan pertemuan wali murid ke sekolah melakukan penayangan tentang rekapitulasi tentang angket yang setiap hari dilakukan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan karakter mereka, setelah diadakan penanaman karakter prestasi siswa meningkat yaitu siswa juga lebih disiplin karena siswa harus datang sekolah minimal jam 07.00 pagi kalau tidak mereka akan ketinggalan pelajaran. Selanjutnya sekolah tersebut akan mengikuti pola kerja kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter dan program-program yang dijalankan dalam meningkatkan pendidikan karakter, meningkatkan

¹⁴ Rohmat, *Kepemimpinan Pendidikan Konsep Dan Aplikasi*, ..., hlm. 97.

sarpras yang harus dibenahi, penambahan sarana pun tetap ada. Hambatannya lebih pada apa yang dibiasakan di sekolah berbeda dengan di rumah.¹⁵

SMP Negeri 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas adalah sebuah lembaga sekolah yang terletak di Jl. Gereja No. 20 Purwokerto. Dari latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Bagi Siswa SMP Negeri 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai judul proposal skripsi tersebut diatas dan agar mudah dimengerti maksudnya, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan Kepala Sekolah

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.¹⁶

Kebijakan publik dalam pendidikan agar menjamin pendidikan menjadi kepentingan publik. Pada awalnya, persekolahan, pendidikan merupakan urusan warga swasta yang disediakan oleh sebagian kecil masyarakat. Namun, sekolah diciptakan oleh pemerintah untuk seluruh warga. Selanjutnya kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang diatur tidak hanya kurikulum, pedagogi, dan penilaiannya, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan sarana fisik sekolah.¹⁷

Secara sederhana, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima

¹⁵ Wawancara dengan Pak Riyadi, tanggal 06 Agustus 2018.

¹⁶ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 41.

¹⁷ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 132.

pelajaran.¹⁸ Kepala sekolah merupakan pemimpin yang menjalankan perannya dalam memimpin sekolah sebagai lembaga pendidikan.¹⁹ Kebijakan kepala sekolah adalah suatu hasil keputusan yang dibuat secara bijaksana oleh kepala sekolah untuk mencapai tujuan.

2. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga negara.²⁰ Karakter adalah suatu sifat atau akhlak yang melekat pada diri setiap manusia yang dapat menjadikan perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya. Karakter merupakan kemampuan individu untuk mengatasi keterbatasan fisiknya dan kemampuannya untuk membaktikan hidupnya pada nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta merupakan serangkaian dalam sikap dan tingkah laku.

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen: kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, sehingga menjadi manusia sempurna sesuai dengan kodratnya.²¹

Manajemen pendidikan karakter dengan bidang garap peserta didik, diwujudkan dalam bentuk program pembinaan peserta didik, sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang pembinaan peserta didik. Sekolah diharapkan memiliki program-program atau kegiatan yang dapat mengantarkan peserta didik memiliki kompetensi dan mampu

¹⁸ Doni Juni Priansa Dan Rismi Somad, *Manajemen Supervisi Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 49.

¹⁹ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 135.

²⁰ Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter, ...*, hlm. 13.

²¹ Mulyasa, *Educational Leadership Mewujudkan Efektifitas Kepemimpinan Pendidikan*, (Malang: UIN Malang Press, 2012), hlm. 7.

bersaing atau berprestasi maksimal, baik dalam bidang akademik dan non akademik.²²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai kepada warga sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik guna bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Nilai-nilai karakter yang diterapkan di SMP Negeri 2 Purwokerto antara lain nilai religius, nilai nasionalisme, nilai gotong royong, nilai integritas, nilai toleransi.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Purwokerto

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Purwokerto adalah Suatu lembaga pendidikan formal tingkat menengah pertama yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional yang berlokasi di Jalan Gereja No. 20 Desa Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

Sekabupaten Banyumas yang menjadi piloting proyek yaitu SMP Negeri 2 Purwokerto yaitu sebagai sekolah perintis pendidikan karakter. Sekolah tersebut akan mengikuti pola kerja kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter. Sedangkan kaitannya peneliti dengan sekolah ini adalah meneliti tentang bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan dari kebijakan kepala sekolah dalam meningkan pendidikan karakter yaitu penulis bisa mendapatkan gambaran terkait pendidikan karakter, mengetahui program serta pelaksanaannya, dan mengetahui faktor-faktor serta bagaimana mengupayakan perbaikan dari hambatan.

²² Agus Wibowo, *Managemmen Pendidikan Karakter*, ... hlm. 117.

b. Tujuan Khusus

- 1) Penulis bisa mendapatkan gambaran secara detail tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto.
- 2) Penulis bisa mengetahui program dan pelaksanaan dari kebijakan kepala sekolah dalam pendidikan karakter.
- 3) Penulis bisa mengetahui proses dari kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto.
- 4) Penulis bisa mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menunjang dan menghambat dalam pendidikan karakter.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengayaan pengetahuan tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter.
- b. Memberikan gambaran tentang pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas.
- c. Menambah pengalaman dan pelajaran dalam penelitian, khususnya bagi penulis.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka diperlukan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan. Dan perlu ditegaskan landasan teori memiliki dasar yang kokoh, jadi dalam hal ini penulis menggunakan referensi atau keputusan yang ada kaitannya dengan judul skripsi. Adapun tinjauan pustaka pada skripsi ini sebagai berikut:

Nurul Zuriah menjelaskan bahwa penanaman di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pola pikir anak sudah mampu untuk diajak memahami dan melihat nilai-nilai hidup berdasarkan pertanggungjawabannya serta dasar pemikirannya. Pada jenjang pendidikan menengah semakin terbuka kemungkinan

menawarkan nilai-nilai hidup menjadi budi pekerti manusia melalui segala kemungkinan kegiatan, tidak adanya pada unsur akademis semata.²³

Dari sisi fokus penelitian sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan yaitu pertama, Abdul Wahab Zain yang berjudul *Strategi Pimpinan Madrasah Dalam Mengembangkan Karakter Siswa Di MTS Ma'arif NU Kebasen Kabupaten Banyumas*. Tujuan penelitian ini untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan sehat, berilmu, cakap, mandiri, serta bertanggung jawab. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa 1) program pimpinan madrasah dalam mengembangkan karakter siswa meliputi: religius, cinta lingkungan, menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. 2) strategi pimpinan madrasah dalam mengembangkan karakter siswa melalui: a) kegiatan pembinaan kelas khusus, b) kegiatan kepramukan, c) pengembangan bakat dan minat. Adapun dari nilai-nilai karakter yang diterapkan dalam kegiatan mengembangkan karakter siswa seperti: mandiri, disiplin, kejujuran dan tanggungjawab.

Adapun metode yang diterapkan dalam mengembangkan karakter peserta didik melalui metode praktek yang diharapkan terbiasa atau lebih membekas dalam perilakunya. Persamaan dari skripsi penulis dengan skripsi di atas ialah mengenai kebijakan kepala sekolah dan karakter. kesamaan dari skripsi ini di atas ialah mengenai kepala sekolah dan pendidikan karakter. Perbedaannya adalah dalam skripsinya menjelaskan terkait strategi pemimpin mengembangkan karakter siswa sedangkan peneliti meneliti tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter.²⁴

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Kholid Mu'min yang berjudul *Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Siswa Di SMK Ma'arif 1 Ajibarang*. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan mutu siswa SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang. Adapun metode

²³ Zuriyah Nurul, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual Futuristik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 51.

²⁴ Abdul Wahab Zain, *Strategi Pimpinan Madrasah Dalam Mengembangkan Karakter Siswa Di MTS Ma'arif Nu 1 Kebasen Kabupaten Banyumas*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. V.

pengumpulan data meliputi wawancara/interview, dokumentasi, dan observasi/pengamatan. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan kepala sekolah terkait dengan peningkatan siswa di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang sudah dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan mutu siswanya.

Dalam melaksanakannya ada beberapa langkah yang dilakukan, diantaranya adalah: (a) perumusan dan perencanaan, (b) pelaksanaan kebijakan kepala sekolah. Peningkatan kualitas pendidik yaitu dengan mengikutsertakan para guru untuk mengikuti program pelatihan dan pembinaan guru, perekrutan tenaga pengajar sesuai dengan sastra I, penekanan terhadap guru untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Peningkatan kualitas siswa yaitu dengan cara membuat kelas khusus produktif, melaksanakan prakerin industri, menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Persamaan dari skripsi ini di atas adalah kebijakan kepala sekolah. Perbedaannya adalah dalam skripsinya meneliti tentang meningkatkan mutu sedangkan peneli akan meneliti terkait pendidikan karakter.²⁵

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Nailul Azmi yang berjudul Manajemen Pendidikan Karakter Siswa MAN 1 Brebes Dan MAN 2 Brebes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen pendidikan karakter siswa MAN 1 Brebes dan MAN 2 Brebes. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan karakter MAN 1 Brebes dan MAN 2 Brebes dilakukan secara terpadu pada setiap kegiatan sekolah melalui tiga jalur utama, yaitu (1) terpadu melalui kegiatan pembelajaran, (2) terpadu melalui kegiatan Ekstrakurikuler, dan (3) terpadu melalui pembudayaan dan pembiasaan. Manajemen pendidikan karakter siswa MAN 1 Brebes dan MAN 2 Brebes terdiri dari: (1) perencanaan pendidikan karakter, (2) pengorganisasian pendidikan karakter, (3) pelaksanaan pendidikan karakter, dan (4) pengawasan pendidikan karakter.

²⁵ Kholid Mu'min, *Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Siswa Di SMK Ma'arif 1 Ajibarang*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. V.

Perencanaan pendidikan karakter meliputi perencanaan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembudayaan dan pembiasaan. Pengorganisasian pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembudayaan dan pembiasaan. Pelaksanaan pendidikan karakter meliputi pelaksanaan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembudayaan dan pembiasaan. Pengawasan pendidikan karakter meliputi pengawasan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembudayaan dan pembiasaan. Persamaan dari skripsi di atas adalah pendidikan karakter. Dan perbedaannya dari skripsi di atas adalah meneliti manajemennya sedangkan peneliti meneliti kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang bermaksud untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan skripsi. Penulis membagi skripsi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab. Uraian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian teori yang terdiri dari: Pengertian kebijakan pendidikan, manfaat dan tujuan kebijakan pendidikan, karakteristik kebijakan pendidikan, pendekatan kebijakan, tahapan-tahapan kebijakan, kebijakan pendidikan sebagai bagian kebijakan publik, pengertian pendidikan karakter, fungsi pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, prinsip pendidikan

²⁶ Nailul Azmi, *Manajemen Pendidikan Karakter Siswa MAN 1 Brebes Dan MAN 2 Brebes*, Tesis, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. ii.

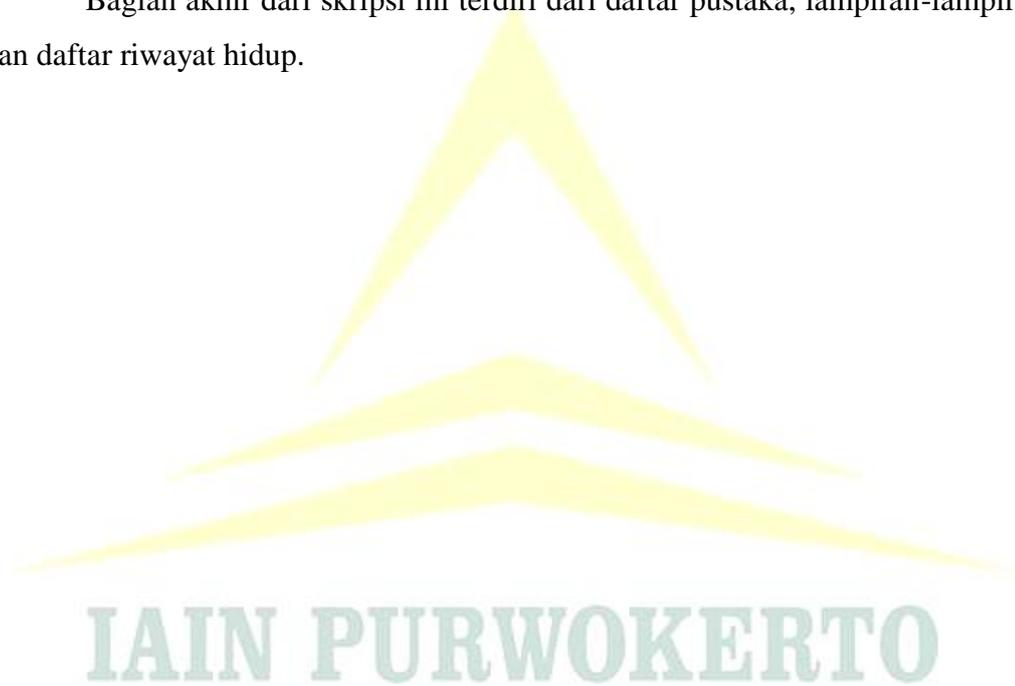
karakter, nilai pendidikan karakter, strategi pendidikan karakter, kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang penyajian dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari simpulan, saran-saran dan kata penutup.

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan difahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara-negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara bangsa secara keseluruhan.²⁷ Kebijakan pendidikan merupakan sesuatu produk yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan pendidikan.

Duke dan Canady mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu: (1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, (2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, (3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif, (7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.²⁸

Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh kepala sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi kepemimpinannya. Disamping itu pendelegasian tanggung jawab supervisi kepadanya, kesadaran terhadap

²⁷ Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul (Kasus Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Jembrana 2000-2006)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 37.

²⁸ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: Maliki Press, 2010), hlm. 3.

fungsinya sebagai pemimpin pendidikan serta waktu yang dapat dipakai oleh kepala sekolah untuk menjalankan fungsi supervisi adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kepala sekolah untuk mengembangkan kepemimpinannya.²⁹

Kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien.³⁰ Kebijakan pendidikan merupakan suatu penilaian terhadap sistem nilai yang dioperasikan dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai perencanaan untuk mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa terwujud. Jadi kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan dalam mengambil keputusan pendidikan yang disesuaikan dengan lingkungan hidup.

Kebijakan dibuat mengacu pada paradigma baru pendidikan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen.³¹

Kerangka konseptual dalam analisis kebijakan terdiri dari 7 (tujuh) proses perencanaan kebijakan, masing-masing adalah:

a. Analisa terhadap situasi yang ada saat ini

Analisis kebijakan harus mempertimbangkan sejumlah aspek dari konteks yang ada seperti konteks sosial, masalah ekonomi, demografi, budaya, yang mungkin saja mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaannya pada sektor pendidikan.

²⁹ Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hlm. 127.

³⁰ Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 20.

³¹ Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan*, ..., hlm. 18.

b. Kurun pemilihan kebijakan

Sebuah kebijakan baru biasanya dihasilkan ketika terdapat masalah pada situasi yang ada, dimana masalah tersebut mengganggu terhadap konteks kebijakan yang ada. Selanjutnya pilihan kebijakan dapat dihasilkan dalam beberapa cara yang berbeda untuk mengakomodasi ketidakseimbangan berikut.

c. Evaluasi pilihan kebijakan

Sebuah imajiner yang dibayangkan akan terjadi bila kebijakan itu diterapkan, selanjutnya dapat menjadi acuan pilihan pertanding terhadap situasi sekarang, sehingga akan didapatkan sebuah skenario transisi yang memungkinkan adanya evaluasi untuk mencapai suatu keinginan yang diharapkan guna tercapainya kelayakan sebuah pelaksanaan kebijakan.

d. Pembuatan keputusan kebijakan

Hal yang terpenting pada tahap pembuatan keputusan kebijakan ini adalah bahwa pengambilan keputusan tersebut telah benar-benar dianalisa secara cermat dari berbagai sumber data dan informasi yang relevan, sehingga kebijakan yang diputuskan benar-benar relevan dengan situasi kondisi yang diharapkan pada negara tersebut.

e. Perencanaan pelaksanaan kebijakan

Perencanaan untuk pelaksanaan kebijakan harus melibatkan semua komponen yang nyata termasuk para analis yang berperan mengambil keputusan tersebut, para pemerhati terhadap kebijakan yang akan diterapkan *stakeholder* lainnya yang ada kaitannya dengan kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut. Semua komponen tersebut harus dilibatkan agar pada tahap pelaksanaan nantinya dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ingin dicapai.

f. Dampak penilaian kebijakan

Selanjutnya setelah kebijakan tersebut dijalankan dalam waktu yang cukup lama, maka selanjutnya kebijakan tersebut perlu dikaji lagi atau perlu dinilai kelayakannya sesuai dengan kondisi yang telah ada seiring dengan berjalannya waktu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

g. Siklus kebijakan berikutnya

Jika inisiatif kebijakan yang dilakukan secara sistematis, mengacu pada proses desain kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dampak, dan re-desain yang berulang maka tentunya sebuah kebijakan yang ada akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan dan target yang ingin di capai.³²

2. Manfaat dan Tujuan Kebijakan Pendidikan

Tujuan dari adanya kebijakan pendidikan tersebut adalah sudah pasti untuk mengatur mekanisme pendidikan yang ada untuk dapat mencaai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks negara Indonesia, maka tujuan dengan adanya kebijakan pendidikan adalah untuk mengawal dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.³³

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan kualitas *Output* yang handal dan kompetitif serta peningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang handal dan memiliki kemampuan bersaing di masa datang, dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai kebijakan telah diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional. Disamping itu kebijakan ini dibuat dalam rangka tugas dan fungsi Departemen Pendidikan Nasional. Maka dari itu berbagai kebijakan dibuat dengan tujuan:

- a. Menetapkan sistem dan standar pengelolaan pada semua jenjang pendidikan dengan mengupayakan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan.
- b. Meningkatkan sosialisasi, diseminasi, advokasi, perintisan dan perluasan program layanan pendidikan serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat pada semua jenjang.

³²Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 269-283.

³³Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*, ..., hlm. 253-254.

- c. Meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat.
- d. Meningkatkan daya tampung, serta mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- e. Menyempurnakan kurikulum nasional, dengan konsep pembelajaran moral, keimanan dan ketakwaan, budi pekerti, sastra dan pendidikan lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi setempat dan sistem penilaian hasil belajar siswa, serta menyempurnakan standar kompetensi tenaga kependidikan.
- f. Meningkatkan mutu, profesionalisme serta memperbaiki citra, harkat, martabat, serta upaya memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis jenjang pendidikan.
- g. Meningkatkan jumlah peserta didik dan mengembangkan program pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan (*life skills*).
- h. Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat nasional dan internasional.
- i. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan pemuda dan olahraga.
- j. Meningkatkan dan memerdayakan peran dan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*).
- k. Memanfaatkan sistem pengawasan pendidikan pemuda dan olahraga dengan mewujudkan keterpaduan antara pengawasan Inspektorat jenderal dan aparat pengawasan di daerah.³⁴

Studi kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik memiliki tiga manfaat yaitu:

³⁴ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 143-145.

a. Pengembangan ilmu pengetahuan

Dalam kaitan ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan pendidikan sebagai variabel terpengaruh, sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya (*independen variable*). Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan pendidikan. Sehingga nantinya akan diketahui dampak dari suatu kebijakan pendidikan tersebut.

b. Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah pendidikan

Dengan mempelajari kebijakan pendidikan, para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membantu kebijakan pendidikan yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan pendidikan dan dalam pendidikan merupakan suatu kegiatan yaitu pendidikan sebagai teori dan sebagai peraktek, teori-teori pendidikan bercermin pada pendidikan praktek. Jadi pada dasarnya perubahan dalam teori pendidikan dapat mengimbas pada praktik pendidikan.

c. Berguna untuk tujuan politik

Suatu kebijakan pendidikan yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Sedangkan dalam proses belajar, pendidikan harus mampu dalam arti mampu menghasilkan individu serta masyarakat religius yang secara memiliki kecerdasan serta integritas. Kebijakan tersebut dapat meyakinkan lawan-lawan politik yang kurang setuju.³⁵

3. Karakteristik Kebijakan Bidang Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yaitu:

a. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

³⁵ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan, ...*, hlm. 46-47.

b. Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus di penuhi agar kebijakan pendidikan itu di akui dan secara sah berlaku di sebuah wilayah. Jadi kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat yaitu sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di suatu wilayah sehingga dapat dikatakan resmi atau sah berlaku di wilayah tersebut.

c. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Suatu kebutuhan dalam kebijakan pendidikan yaitu fungsi pendukung dalam pengambilan suatu keputusan.

d. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus di buat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Jadi, para administrator pendidikan, dan pengelola pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan yaitu unsur-unsur minimal pembuat kebijakan. Kebijakan pendidikan pada intinya di buat oleh ahlinya yang memiliki wewenang.

e. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter karena dapat adanya evaluasi terhadapnya secara efektif dan mudah.

f. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh

aspeknya yang ingin diatur olehnya.³⁶ Maka sistematika dituntut memiliki efisien dan efektifitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan tidak bersifat logika.

4. Landasan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan sebagai suatu produk, kebijakan pendidikan sering tidak diformulasikan berdasarkan elemen-elemen yang perlu diintegrasikan secara *sinergy*, bukan sebagai komponen yang terdihotomi. Artinya, apakah rumusan-rumusan kebijakan tersebut telah memenuhi kriteria kebijakan yang utuh atau masih terlepas dari luar lingkungannya.³⁷

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan kualitas *output* yang handal dan kompetitif, berbagai kebijakan telah dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kebijakan ini dibuat dalam rangka tugas dan fungsi Departemen Pendidikan Nasional, yang memerlukan sebuah kebijakan yang menjadi kesepakatan antara pusat dan daerah, berwujud kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan pembangunan pendidikan, yang diuraikan menurut program, sebagai berikut:

- a. Memantapkan sistem dan standar pengelolaan pada semua jenjang pendidikan dengan mengupayakan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, antara lain dengan peningkatan efektivitas peran dan fungsi komite sekolah serta dewan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan; pengembangan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi pemanfaatan sumber daya dan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta mengembangkan sistem akreditasi sekolah untuk menciptakan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap proses penyelenggaraan pendidikan sekolah.
- b. Meningkatkan sosialisasi, diseminasi, advokasi, perintisan, dan perluasan program layanan pendidikan serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat pada semua jenjang.

³⁶ Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 20-21.

³⁷ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan; Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.31.

- c. Meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas.
- d. Meningkatkan daya tampung, serta mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, dengan penekanan pada pendidikan akhlak dan budi pekerti luhur, penguasaan ilmu-ilmu dasar (iptek), penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat luas dalam rangka memberikan bekal keterampilan hidup, peningkatan kualifikasi kemampuan dan kualitas guru, penyelenggaraan kompetensi keilmuan, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi peningkatan mutu, pemetaan mutu sekolah, melaksanakan budi pekerti di sekolah, serta penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan.
- e. Menyempurnakan kurikulum nasional.
- f. Meningkatkan mutu.
- g. Meningkatkan jumlah peserta dan mengembangkan program pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan (*life skill*) untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat/keluarga melalui perluasan beasiswa, magang.
- h. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan.
- i. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan pemuda dan olahraga melalui peningkatan koordinasi pemantapan sistem perencanaan, pengendalian, dan penilaian program.
- j. Meningkatkan dan memberdayakan peran dan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*) sebagai saluran informasi dalam mensosialisasikan dana memasarkan program serta pro aktif menyerap aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.

- k. Memanfaatkan sistem pengawasan pendidikan pemuda dan olahraga dengan mewujudkan keterpaduan antara pengawasan Inspektorat Jenderal dan aparat pengawasan di daerah.³⁸

Landasan kebijakan pendidikan merupakan suatu konsep hukum yang mendasari ditetapkannya aturan dalam bidang pendidikan agar terciptanya situasi dan kebutuhan dalam suatu proses pendidikan.

5. Pendekatan Kebijakan Bidang Pendidikan

Secara teoretik, kebijakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan lebih bermutu mencakup empat pendekatan implementatif dalam masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat pendekatan implementatif tersebut adalah:

a. Structural approach

Merupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down* yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Struktur organisasi sangat menentukan kesuksesan sebuah implementasi kebijakan. Struktur organisasi perlu harus mengadopsi inovasi atau perubahan agar tidak ketinggalan zaman serta mampu menjawab dari perubahan dalam masyarakat. Struktur organisasi hanya cocok pada tipe dan lingkungan tertentu.

b. Procedural and managerial approach

Merupakan suatu pendekatan yang muncul dalam rangka memberikan koreksi atas pendekatan sebelumnya yang dianggap memiliki beberapa kelemahan. Jadi implementasi dipandang sebagai masalah teknis dan masalah manajerial.

c. Behavioural approach

Hadir dalam rangka memberikan koreksi atas pendekatan dan manajerial banyak perilaku dari pegawai-pegawai yang menduduki posisi-

³⁸ Hasbullah, Kebijakan Pendidikan, ..., hlm. 143-145.

posisi kunci. Dalam implementasi akan berhasil jika implemetator mampu dalam menganalisis perilaku manusia dan sikap manusia.

d. Political approach

Adalah pendidikan yang leih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam suatu organisasi, selalu ada perbedaan dan persaingan antar individu atau kelompok dalam merebutkan pengaruh.³⁹ Dalam political approach yaitu implementasi suatu kebijakan akan berhasil jika mampu dalam memperhitungkan real itu kekuasaan yang mana sudah berlaku.

Sedangkan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam kerangka perumusan kebijakan pendidikan yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan ini mengandalkan bahwa tugas membuat kebijakan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah.

2) Pendekatan Proses

Berdasarkan pendekatan proses, kebijakan pendidikan diformulasikan melalui tahapan-tahapan yang runtut, tidak melompat-lompat atau langsung jadi.

3) Pendekatan Teori Kelompok

Dalam formulasi kebijakan pendidikan, pendekatan teori kelompok mengumpamakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan titik keseimbangan (*equilibrium*).

4) Pendekatan Elitis

Kalangan ahli banyak yang melihat bahwa dalam suatu sistem politik, kebijakan pendidikan dibuat dan banyak dipengaruhi oleh para elite dari sistem itu.

5) Pendekatan Rasional

³⁹Arif Rohman & Teguh Wiyono, *Education Policy in Decentralization Era*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 7-12.

Pendekatan rasional haruslah didasarkan keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Jadi pendekatan rasional lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis.⁴⁰

6. Tahapan-Tahapan Kebijakan

Ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga proses tersebut kebijakan dimaksud diuraikan agar holistik makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik, ketiga proses tersebut yaitu:

a. Formulasi Kebijakan

Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada suatu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan. Hal itu tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen adalah berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Dengan demikian, ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas penting yang mesti dilaksanakan adalah mengorganisasikan dan melaksanakan kepemimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan.

Tujuan dari perencanaan adalah untuk mendapatkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi serta mendapatkan berbagai deskripsi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.⁴¹

Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan:

- a) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

⁴⁰ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan, ...*, hlm. 87-89.

⁴¹ Novan Ardy Wiyani, *Perencanaan Program Kegiatan PAUD Responsif Gender*, Yin Yang, Vol. 12 No. 2 2017, hlm. 335.

- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuatan kebijakan.
- e) (siapa) pelaksana program.
- f) Sumber daya yang dikerahkan.⁴²

b. Implementasi Kebijakan

Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu langsung mengimplementasikan program-program, atau dapat melakukan kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan bermakna pengembangan kriteria khusus dalam praktik bagi pembuatan keputusan yang mencapai maksud kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan maka yang diperhatikan adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor tersebut bekerja secara simultan, baik berfungsi dalam memudahkan pelaksanaan kebijakan dan dapat pula mempengaruhi proses pelaksanaan sehingga kurang berhasil.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi kemampuan kebijakan tersebut yang secara nyata dalam mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya proses implementasi kebijakan perlu dievaluasi dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil akhir program-program yang dilaksanakan dengan tujuan-tujuan pendidikan.⁴³

c. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, jadi evaluasi adalah suatu cara untuk menilai program apakah sudah berjalan dengan baik.⁴⁴ Dalam proses manajemen, pengawasan

⁴² Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan; Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 83.

⁴³ Yoyon bahtiar irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan; Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.

⁴⁴ Hayat, *Reformasi Kebijakan Publik : Perspektif Makro dan Mikro*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 66.

adalah keharusan atau diperlukan sebagai proses pemantauan atau evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (*stakeholders*).

Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Dengan demikian evaluasi tidak dimaksudkan mencapai kesalahan para pelaksana kebijakan, akan tetapi pesan utamanya adalah supaya kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diperbaiki sehingga pencapaian tujuan lebih maksimal.⁴⁵

Tanpa pengujian pelaksanaan dan hasil usaha, ada sedikit kemungkinan peningkatan program. Beberapa sasaran evaluasi kebijakan, sebagaimana pendapat Glaser, Abelson, dan Garrison, yaitu:

- a) Menentukan seluruh kebijakan dan nilai kebijakan dalam pencapaian maksud sasaran.
- b) Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan komponen kebijakan.
- c) Penerimaan program strategis yang merupakan kontribusi terbaik terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
- d) Penilaian efek samping yang tidak diharapkan atau akibat yang tidak diinginkan dari usaha kebijakan.⁴⁶

7. Kebijakan Pendidikan Sebagai Bagian Kebijakan Publik

Lebih lanjut Riant Nugroho mengungkapkan bahwa kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk, yaitu:

a. Kebijakan formal

Kebijakan formal merupakan berbagai keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Semua kebijakan di Indonesia yang menganut sistem kontinental (diwariskan oleh Belanda) disamakan dengan hukum. Ini didasarkan pada

⁴⁵ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 81-88.

⁴⁶ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*..., hlm. 89.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Konvensi atau kebiasaan atau kesepakatan umum

Kebijakan ini dibuat oleh organisasi, baik itu organisasi internasional, nasional, maupun daerah. Konvensi biasanya dibuat melalui berbagai forum atau pertemuan resmi yang dihadiri oleh para pemimpin organisasi.

c. Pernyataan pejabat publik

Sedangkan bentuk ketiga dari kebijakan publik adalah pernyataan pejabat publik di depan publik ataupun pernyataan pejabat publik yang dipublikasikan di media massa.

d. Perilaku pejabat publik

Hal ini dimulai dari gaya kepemimpinannya yang ditiru oleh bawahannya. *Gesture* pimpinan juga ditiru oleh bawahan. Selain itu sikap pimpinan ketika memimpin juga bukan hanya ditiru oleh bawahannya tetapi juga oleh masyarakat. Itulah sebab perilaku apa yang dilakukan oleh pejabat publik dapat menjadi suatu kebijakan yang dapat menjadikan seseorang menirunya.⁴⁷

B. Pendidikan Karakter

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi penggerak, serta membedakannya dengan individu lain. Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai moral dalam hidupnya.⁴⁸

Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan

⁴⁷ Novan Ardy Wiyani, *Kapita Selekta PAUD; Alternatif-Solusi Problematika Penyelenggaraan PAUD*, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), hlm. 29-32.

⁴⁸ Novan Ardy Wiyani, *Teacher Preneurship; Gagasan & Upaya Menumbuhkembangkan Jiwa Kewirausahaan Guru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 21.

dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidikan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya.⁴⁹

Pendidikan karakter adalah upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, kebangsaan, kemudian nilai-nilai tersebut dapat terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan.⁵⁰ Penguatan pendidikan karakter merupakan suatu gerakan pendidikan yang membantu dalam pergerakan memperkuat karakter melalui proses pembentukan dengan mengembangkan potensi peserta didik dengan menggunakan cara dari olah pikir, olah hati, dan olah raga, dan olah rasa. Pendidikan karakter memiliki 5 nilai yaitu religius, gotong royong, nasionalisme, mandiri dan integritas.

Pendidikan karakter merupakan upaya pembimbingan perilaku siswa agar mencintai, dan melakukan perbaikan. Fokusnya pada tujuan-tujuan etika melalui proses pendalaman apresiasi dan pembiasaan.⁵¹ Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik (*good character*) berlandaskan kebajikan-kebajikan inti (*core virtues*) yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat. Sedikitnya, ada empat alasan mendasar mengapa sekolah pada masa sekarang perlu lebih bersungguh-sungguh menjadikan dirinya tempat terbaik bagi pendidikan karakter. Keempat alasan itu adalah:

- a. Dikarenakan banyak keluarga (tradisional maupun non tradisional) yang tidak melaksanakan pendidikan karakter.

⁴⁹ Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah (Konsep dan Praktik Implementasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 137.

⁵⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm. 35.

⁵¹ Retno Listyarti, *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 3.

- b. Sekolah tidak hanya bertujuan membentuk anak yang cerdas, tetapi juga anak yang baik.
- c. Kecerdasan seorang anak hanya bermakna manakala dilandasi dengan kebaikan.
- d. Karena membentuk anak didik agar berkarakter tangguh bukan sekedar tugas tambahan bagi guru, melainkan tanggung jawab yang melekat pada perannya sebagai seorang guru.⁵²

Pendidikan adalah jantung kehidupan, di mana tanpa pendidikan kehidupan akan berjalan di tempat tanpa melakukan perubahan yang berarti. Pendidikan tak lain adalah kesadaran dan penyadaran untuk menjadi lebih dewasa. Dengan begitu, kehidupan berkat pendidikan melaju menuju arah yang lebih sempurna. Pendidikan agama harus diajarkan kepada anak sejak usia dini sehingga menjadi perilaku yang melekat kuat sampai masa remaja dan dewasa.⁵³ Pendidikan karakter dan pendidikan yang berbasis karakter adalah semacam keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Kesadaran ini harus ditanamkan sedalam mungkin ke dalam jiwa masyarakat, dan tentunya melalui jalur pendidikan.⁵⁴

Mendisiplinkan para remaja merupakan hal yang besar yang dapat membantu dalam membimbingnya menuju tahap kedewasaan yang lebih baik. Orang tua perlu membentuk karakter disiplin pada anak sedini mungkin walaupun ada yang berasumsi bahwa pada anak usia dini masih belum mempunyai tanggungjawab yang besar dan kedisiplinan bukan merupakan hal yang penting. Jika karakter disiplin tersebut dibentuk kepada anak sejak dini, tentu akan menjadi sebuah modal yang sangat berharga bagi anak pada saat mereka dewasa.⁵⁵ Dalam membentuk karakter sejak usia dini

⁵² Saptono, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter (Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis)*, (Salatiga: Esensi Erlangga Group, 2011), hlm. 23-24.

⁵³ Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Mengurai Krisis Karakter Bangsa*, (Jakarta: Kencana, 2018.), hlm. 114.

⁵⁴ Ida Zusnani, *Manajemen Pendidikan (Berbasis Karakter Bangsa)*, (Jakarta: Tugu Publisher, 2012), hlm. 10.

⁵⁵ Novan Ardy wiyani, *Bina Karakter Anak Usia Dini; Panduan Orangtua & Guru Dalam Rangka Membentuk Kemandirian & Kedisiplinan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), hlm. 109.

membutuhkan pembinaan serta kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua dan guru ketika berada di sekolah.

Dalam pendidikan karakter di sekolah/madrasah, semua komponen (*stakeholders*) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, mekanisme penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan sekolah atau madrasah, pelaksanaan pengembangan diri peserta didik, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, serta etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah/madrasah.⁵⁶

2. Fungsi Pendidikan Karakter

Peran pendidikan dalam pembangunan karakter adalah sangat strategis karena untuk membentuk karakter peserta didik yang efektif hanya dapat dilakukan melalui pendidikan, dalam hal ini warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nilai-nilai karakter dan moral siswa.

Pendidikan karakter berfungsi: (1) membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural; (2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.⁵⁷

3. Tujuan Pendidikan Karakter

Dengan menempatkan pendidikan karakter dalam kerangka dinamika dan dialektika proses pembentukan individu, para insan pendidik, seperti guru, orang tua, staf sekolah, masyarakat, dll, diharapkan semakin dapat menyadari pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana pembentuk program perilaku, pengayaan nilai individu dengan cara menyediakan ruang

⁵⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 7-8.

⁵⁷ Tutuk Ningsih, *Implementasi Pendidikan Karakter*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 67-68.

bagi figur keteladanan bagi anak didik dan menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif bagi proses pertumbuhan berupa kenyamanan, keamanan yang membantu suasana pengembangan diri satu sama lain dalam keseluruhan dimensinya (teknis, intelektual, psikologis, moral, sosial, estetis dan religius).⁵⁸

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.⁵⁹

Tujuan pendidikan karakter dalam seting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/ kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.
- b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.
- c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.⁶⁰

4. Prinsip Pendidikan Karakter

Manakala sekolah akan melaksanakan pendidikan karakter, pertama-tama perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan karakter. Ada sebelas prinsip pendidikan karakter, meliputi:

- a. Sekolah harus berkomitmen pada nilai-nilai etis inti.
- b. Karakter harus dipahami secara utuh, mencakup pengetahuan atau pemikiran, perasaan, dan tindakan.

⁵⁸ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 136.

⁵⁹ Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 9.

⁶⁰ Dharma Kesuma, Cepi Triatna, dan Johar Permana, *Pendidikan Karakter Kajian dan Tseori Dan Praktik di Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 9.

- c. Sekolah harus bersikap proaktif dan bertindak sistematis dalam pembelajaran karakter dan tidak sekedar menunggu datangnya kesempatan.
 - d. Sekolah harus membangun suasana saling memperhatikan satu sama lain dan menjadi dunia kecil (mikrokosmos) mengenai masyarakat yang saling peduli.
 - e. Kesempatan untuk mempraktikkan tindakan moral harus bervariasi dan tersedia bagi semua.
 - f. Studi akademis harus menjadi hal utama.
 - g. Sekolah perlu mengembangkan cara-cara meningkatkan motivasi intrinsik siswa yang mencakup nilai-nilai inti.
 - h. Sekolah perlu bekerja bersama dan mendialogkan norma mengenai pendidikan karakter.
 - i. Guru dan siswa harus berbagi dalam kepemimpinan moral sekolah.
 - j. Orang tua dan masyarakat harus menjadi rekan kerja dalam pendidikan karakter di sekolah.
 - k. Harus dilakukan evaluasi mengenai efektivitas pendidikan karakter di sekolah, terutama terhadap guru dan karyawan, serta siswa.⁶¹
5. Nilai pendidikan karakter

Ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Diknas Pendidikan yakni:

- a. Religius, sikap dan prilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- b. Jujur, prilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- c. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

⁶¹ Saptono, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter*, ..., hlm. 25-26.

- d. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- e. Kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- f. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- g. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- h. Demokratis, cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- i. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
- j. Semangat kebangsaan, cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- k. Cinta tanah air, cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- l. Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- m. Bersahabat atau komunikatif, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- n. Cinta damai, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- o. Gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

- p. Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- q. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- r. Tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.⁶²

6. Strategi Pendidikan Karakter

Kepala sekolah harus mampu memobilisasi sumber daya sekolah, dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi pendidikan karakter, pengembangan kurikulum, pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, sarana dan sumber belajar, keuangan, pelayanan peserta didik, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan penciptaan iklim sekolah.

a. Perencanaan dan evaluasi

Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya (*school-based plan*), seperti kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Selain itu, sekolah diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal.

b. Pengembangan kurikulum

Implementasi pendidikan karakter di sekolah memberikan kewenangan kepala daerah dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum pendidikan karakter, terutama dalam mengidentifikasi karakter, dan mengembangkan silabus sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

c. Pengembangan pembelajaran

⁶² Nur Rosyid, dkk, *Pendidikan Karakter: Wacana dan Kepengaturan*, (Purwokerto: Obsesi Press, 2013), hlm. 158-160.

Pembelajaran merupakan unsur yang utama dalam implementasi pendidikan karakter, sehingga interaksi edukatif antara peserta didik dengan lingkungan sekolah.

d. Pengelolaan ketenagaan

Dalam pelaksanaannya pengembanaan ketenagaan ini dapat dilakukan melali kerja sama berbagai pihak dan antarlembaga secara berkesinambungan.

e. Pengelolaan sarana dan sumber belajar

Sarana dan sumber belajar juga akan sangat membantu mempercepat sosialisasi pendidikan karakter kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat lingkungannya.

f. Pengelolaan keuangan

Dalam pengelolaan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang sudah sepatasnya dilakukan di sekolah.

g. Pelayanan peserta didik

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, pelayanan peserta didik ini bisa dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, atau oleh wali kelas, atas nama kepala sekolah.

h. Hubungan sekolah dengan masyarakat

Dalam implementasi pendidikan karakter hubungan sekolah dengan masyarakat ini perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah dan daerah, serta potensi peserta didik secara optimal.

i. Penciptaan iklim sekolah

Keberhasilan implementasi pendidikan karakter sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap implementasi pendidikan karakter di sekolah secara keseluruhan.⁶³

⁶³ Tutuk Ningsih, *Implementasi Pendidikan Karakter*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm.71-78.

Dengan adanya strategi pendidikan karakter di sekolah, bila diterapkan secara maksimal maka akan dapat membentuk karakter siswa akan terbentuk dengan yang diharapkan. Dalam permasalahan kenakalan remaja yang kerap terjadi akan memiliki ketahanan yang kuat dari keseluruhan nilai-nilai karakter yang sudah ditanamkan sebagai pondasi karakter siswa didik, dan terwujudlah generasi muda yang berkualitas untuk membangun bangsa.⁶⁴

C. Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter

Sistem pendidikan nasional harus memiliki kapasitas dalam mengembangkan seluruh potensi manusia baik sebagai pelaku pengembangan maupun sebagai subyek dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Pendidikan harus berfungsi membebaskan manusia dari belenggu yang menghambat pengembangan seluruh potensi dirinya, dengan mengupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas institusi pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.⁶⁵

Dalam kegiatannya, pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya terkait dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.⁶⁶ Perilaku pemimpin adalah satu-satunya faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap budaya di tempat kerja. Jadi apa yang dilakukan pemimpin mengirim pesan lebih kuat dari pada apa yang dikatakan.⁶⁷ seorang pemimpin harus memberi contoh kepada bawahannya yang bertujuan untuk mencapai tujuan.

Pembuatan kebijakan merupakan tindakan yang berpola, yang melibatkan banyak keputusan yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan yang dibuat.⁶⁸ Kebijakan pendidikan memerlukan proses analisis terhadap organisasi dan kepemimpinan yaitu:

⁶⁴ Nur Rosyid, dkk, *Pendidikan Karakter: Wacana dan Kepengaturan, ...*, hlm. 163.

⁶⁵ Subandono dan Suryaman, *Kebijakan Pendidikan: Teori dan Praktek*, (Malang: Wineka Media, 2015), hlm. 3.

⁶⁶ Shoni Rahmatullah Amrozi, *The Power Of Rasulullah's Leadership*, (Jojakarta: Sabil, 2012), hlm. 27.

⁶⁷ Daryanto, *Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 148.

⁶⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm.75.

1. Wawasan tentang kependidikan dan komponen-komponen yang tidak terdapat dalam sustansi sistem manapun kecuali dalam sistem pendidikan.
2. Manajemen pendidikan memfokuskan perhatian pada proses mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, dan berperan sebagai wahana penyediaan kemudahan (fasilitasi) bagi kepentingan proses tersebut.
3. Sistem pendidikan memiliki komponen bukan manusia yang khas berupa kurikulum (materi/bahan, metodologi/teknologi pendidikan, media dan sumber belajar media serta alat/sarana pendidikan).
4. Sistem pendidikan memiliki komponen manusia berupa pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
5. Hubungan manajerial antara pengelola dengan orang yang dikelola berada dalam posisi yang sederajat.
6. Efisiensi-efektifitas dan produktivitas pengelolaan kegiatannya memerhatikan martabat manusia.⁶⁹

Dalam UU Sisdiknas yang dijabarkan dari UUD 45, telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupann bangsa. Dengan demikian UU Sisdiknas yang baru telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu dan amal (shaleh). Hal itu selain tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum (pasal 36 ayat 3), dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya dipadukan menjadi satu.⁷⁰

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk membentuk, mengarahkan dan membimbing perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan dalam perspektif Islam, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk membentuk, mengarahkan dan membimbing akhlak pesera didik dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai

⁶⁹ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 53-54.

⁷⁰ Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan, ...*, hlm. 37.

dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ulama.⁷¹

Pemerintah merancang kurikulum berbasis pendidikan karakter yang utamanya bertujuan untuk mencetak siswa yang berkarakter. Selain itu pembangunan karakter melalui kurikulum pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur pancasila.⁷²

Pada Lampiran III Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 disebutkan bahwa ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah yang ditujukan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, serta kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan kurikulum.⁷³

Perencanaan strategi (*strategic planning*) merupakan proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut serta penetapan berbagai metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategik dan kebijakan telah diimplementasikan. Para manajer akan memberikan kepada organisasi tujuan-tujuan yang dirumuskan secara jelas dan strategi bagi pencapaian tujuan tersebut dengan menggunakan perencanaan strategik.⁷⁴

Internalisasi nilai-nilai karakter tersebut dilakukan melalui tiga strategi, yaitu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, menginternalisasikan nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran, menginternalisasikan nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan pembiasaan, dan melakukan manajemen sekolah yang berpihak pada praktik penyelenggaraan pendidikan karakter.⁷⁵

⁷¹ Novan Ardy Wiyani, *Penerapan TQM Dalam Pendidikan Akhlak*, JIP, Vol. XXVII No. 2, hlm. 228.

⁷² Nur Rosyid, dkk, *Pendidikan Karakter: Wacana dan Kepengaturan*, ..., hlm. 194.

⁷³ Novan Ardy Wiyani, *Format Kegiatan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib di Madrasah Ibtidaiyah dalam Kurikulum 2013.*, Insania, Vol. 19, No. 1 2014, hlm. 155.

⁷⁴ Novan Ardy Wiyani, *Perencanaan Strategi Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di TK Islam Al-Irsyad Purwokerto*, Al –Athfal Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 3 No. 2 2017, hlm. 112.

⁷⁵ Novan Ardy Wiyani, *Konsep Pendidikan Karakter Menurut Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M. Pd.*, Insania, Vol. 20 No.2 Juli-Desember 2015, hlm. 159.

Pengembangan pendidikan karakter bisa dilaksanakan melalui rencana anggaran, program-program pendidikan, dan pendekatan kurikulum yang berjiwa pendidikan karakter. Berhadapan dengan kemerosotan moral dalam masyarakat, para pendidik seringkali menyederhanakan persoalan sekedar pada lemahnya iman dan pengetahuan agama sehingga untuk mengatasinya, pendidikan agama menjadi mutlak diperlukan. Kesalahan pandangan seperti inilah yang membuat pembaruan apa pun yang mengatasnamakan pendidikan karakter tidak tepat sasaran.⁷⁶

Dalam konteks implementasi pendidikan karakter, manajemen strategik merupakan sebuah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membentuk karakter peserta didik disuatu lembaga pendidikan.⁷⁷

Dalam menyukseskan pendidikan karakter di sekolah perlu dipilih kepala sekolah yang amanah dengan kemampuan manajemen serta kepemimpinan yang tangguh, agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Dalam menyukseskan pendidikan karakter, perlu dipersiapkan kepala sekolah yang amanah melalui pengangkatan yang profesional; misalnya dipilih dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun), dan setelah itu dilakukan lagi pemilihan yang baru. Hal ini akan menumbuhkan iklim demokratis di sekolah, yang akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi terciptanya kualitas pembelajaran yang optimal untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik.⁷⁸

Usaha pelaksanaan pendidikan karakter berbasis iman dan taqwa hendaknya tidak hanya dilakukan di sekolah saja tapi juga dilakukan di lingkungan keluarga. Orang tua juga harus berperan dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada anaknya sekalipun guru sudah memainkan

⁷⁶ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter, ...*, hlm. 189-190.

⁷⁷ M. Najib, Novan Ardy Wiyani, Solichin, *Proses Manajemen Strategi Untuk Membentuk Karakter Anak Usia Dini di TK Islam Al-Irsyad Purwokerto*, JPA, Vol. 17 No. 1 Januari-Juni 2016.

⁷⁸ Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter, ...*, hlm. 29-30.

peranan itu di sekolah. ini pun menjadi dasar yang kuat perlunya kerjasama antara sekolah dan orang tua peserta didik.⁷⁹

Dari kegiatan ekstrakurikuler terdapat nilai-nilai karakter yang bisa didapatkan oleh peserta didik yaitu dari kegiatan pramuka, problem nyata yang menimpa kegiatan pramuka di sekolah dan masyarakat, seandainya saja pembina mampu dan mau berkomitmen untuk mengintegrasikan pendidikan karakter, maka problem tersebut tidak akan muncul. Momentum yang tepat untuk melaksnakannya sebagai perwujudan dari gagasan pendidikan karakter agar tujuan dari pendidikan karakter dapat tercapai, dan mempunyai pengaruh terhadap belajar peserta didik.⁸⁰

Kebijakan pendidikan karakter yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan menggunakan pola strategi makro dan strategi mikro di satuan pendidikan yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) diharapkan mampu diimplementasikan oleh satuan-satuan pendidikan agar memberikan hasil yang optimal untuk terbentuknya karakter peserta didik yang baik dan berahlak mulia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, dengan karakter yang baik dan berahlak mulia yang sudah terbentuk dalam pribadi setiap peserta didik akan mampu meredam dan meminimalkan tindakan-tindakan serta penyimpangan norma-norma yang berlaku sehingga tidak menimbulkan konflik di antara peserta didik maupun warga masyarakat pada umumnya. Pendidikan pada hakikatnya merupakan media yang cukup strategis dalam membangun karakter.⁸¹

Dalam meningkatkan pendidikan karakter kepala sekolah harus mensosialisasikan kepada orang tua peserta didik dan masyarakat terkait program-program dalam pengembangan pendidikan karakter, visi dan misi. Jadi dengan adanya sosialisasi diharapkan memperoleh dukungan dari stakeholder-stakeholder yang berada di dekat lingkungan sekolah. Setelah melakukan sosialisasi kepala

⁷⁹ Novan Ardy Wiyani, *Pendidikan Karakter berbasis Iman Dan Taqwa*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 189.

⁸⁰ Novan Ardy Wiyani, *Pendidikan Karakter dan Kepramukaan*, (Yogyakarta: Citra Aji Parama, 2012), hlm. 57.

⁸¹ Tutuk Ningsih, *Implementasi Pendidikan Karakter*, (Purwokerto: STAIN Press, 2015), hlm. 47.

sekolah akan mengintegrasikan pendidikan karakter yang unggul melalui penerapan di lingkungan-lingkungan sekolah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil peneliti lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸²

Berdasarkan masalah yang akan dikaji menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan data yang mana dihasilkan bukan dari non statistik, tetapi berdasarkan dari bentuk kalimat atau kata-kata.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di SMP Negeri 2 Purwokerto dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sekolah ini sebagai model piloting proyek sekabupaten Banyumas.
- b. Di SMP Negeri 2 Purwokerto memiliki program khusus yaitu integritas mata pelajaran, jadi di dalam setiap mata pelajaran itu sudah terpadu terintegrasi baik di dalam rencana pembelajaran maupun di dalam pelaksanaannya.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek adalah Objek penelitian ini adalah Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto.

⁸² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 15.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu sumber informasi yang diambil untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Dalam penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi yang diteliti.⁸³

Subjek penelitian adalah orang-orang yang berhubungan langsung dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lokasi atau subjek penelitian. Sedangkan subjek penelitiannya adalah kepala sekolah, waka kurikulum dan guru PKn.

a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan suatu komponen pendidikan yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap sekolah yang dipimpin. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto yaitu Bapak Bayu Heryanto, S. Pd. Penulis meneliti mengenai implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter.

b. Waka Kurikulum

Waka kurikulum merupakan membantu kepala sekolah dalam membuat program, mengatur pelaksanaan dan evaluasi dalam pembelajaran. Waka Kurikulum Bapak Riyadi Setyarsono, S.Pd. yaitu Penulis meneliti tentang mengelola data siswa mengenai kegiatan peserta didik di sekolah.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 218-219.

c. Guru PKn

Guru merupakan tenaga pendidik yang memiliki tugas untuk menyampaikan pelajaran serta bisa mengayomi para peserta didiknya. Penulis akan meneliti mengenai cara menerapkan pendidikan karakter. Bapak Waryanto, S.Pd. merupakan guru PKn di SMP Negeri 2 Purwokerto dari beliau penulis memperoleh data tentang pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran dan di sekolah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan.⁸⁴

Metode ini dilakukan secara langsung yaitu berkomunikasi langsung dengan subjek untuk memperoleh data. Penulis yang melakukan menggunakan wawancara terpimpin yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang sebelumnya belum disiapkan dan ditulis penulis sebelumnya.

Wawancara pertama, pada tanggal 4 Januari 2019 dengan Bapak Riyadi Setyarsono pada pukul 09.00 WIB tentang mengelola data siswa mengenai kegiatan peserta didik di sekolah. Wawancara kedua, pada tanggal 7 Januari 2019 dengan Bapak Waryanto pada pukul 09.00 WIB tentang pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran dan di sekolah. Wawancara ketiga, pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Bapak Bayu Heryanto pada pukul 09.00 WIB tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter.

2. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

⁸⁴ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, hlm 118.

Observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan yang tanpa tujuan bukan merupakan observasi.⁸⁵

Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati atau mengawasi langsung ke lokasi penelitian. Dalam pelaksanaannya penulis melakukan observasi terstruktur, yaitu observasi secara sistematis dan secara urut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dikumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel apabila didukung dengan adanya hasil penelitian dari metode dokumentasi.⁸⁶

Dalam metode ini penulis gunakan untuk meneliti data yang berupa catatan yang berkaitan dengan masalah dan arsip-arsip yang akan diteliti, serta data dari catatan-catatan pendukung lainnya di dalam penelitian ini seperti visi, misi dan struktur organisasi, kartu kegiatan pembiasaan, tata tertib siswa, buku pembinaan apel, profil sekolah, sejarah SMP Negeri 2 Purwokerto, keadaan siswa dan keadaan pendidik, sarana dan prasarana.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisa.⁸⁷

Agar data terkumpul tidak merupakan bahan informasi yang mentah, maka penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang cara pengolahannya lebih banyak atau berdasarkan uraian kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

⁸⁵ Haris herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 132.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

⁸⁷ Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari lapangan (data kasar) yang jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit, yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan dari hasil *Interview* dengan *Key Informan* dan *Group Fokus*.

Dalam reduksi data, penulis melakukan kegiatan memilih dan meringkas data dari catatan-catatan dari data-data yang telah diperoleh dari lapangan, kemudian menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. Setelah data diproses kemudian tindakan selanjutnya adalah melakukan penyajian data.

b. Penyajian Data

Proses penyajian data ini dilakukan setelah data sudah melewati proses reduksi, proses selanjutnya adalah penyajian data (*data display*) sehingga data dapat tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dapat dipahami.

Peneliti melakukan penyajian data yang telah dilakukan redaksi data sebelumnya ini ke dalam bentuk teks naratif. Data yang tersusun dengan benar dalam penyajian data memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pengumpulan data yang berikutnya.⁸⁸ Proses yang terakhir adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk bahasa yang verbal yang mudah dipahami.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data untuk mengolah data terhadap hasil

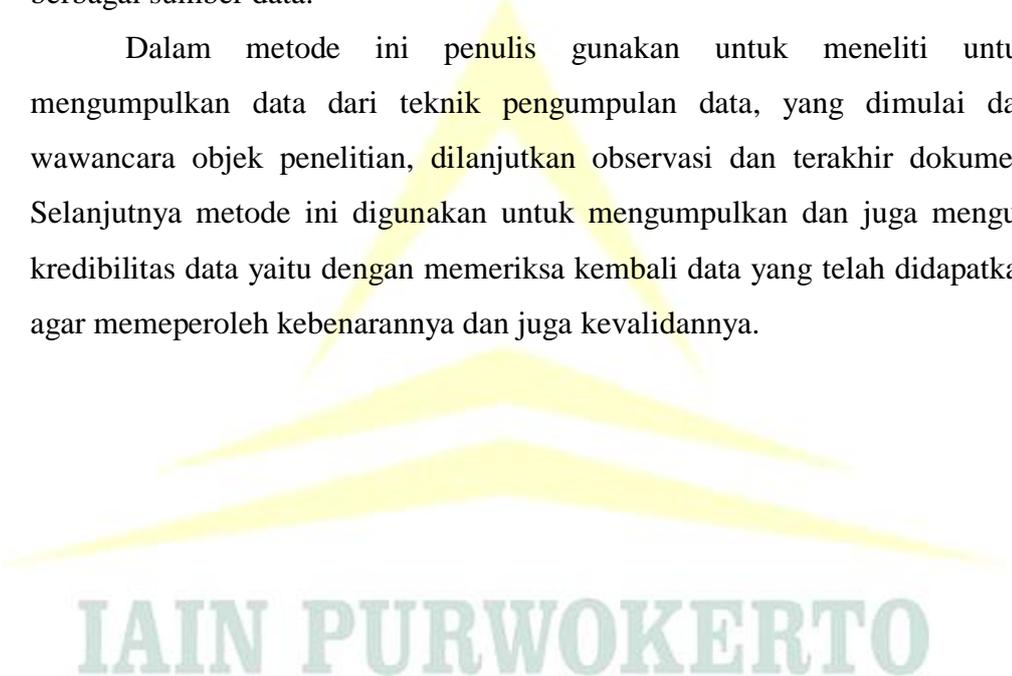
⁸⁸ Connie Chairunnissa, *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Dalam Pendidikan Dan Sosial*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 188-189.

penelitian kemudian disusun menjadi kata-kata dan kalimat yang rasional sehingga mudah dipahami.

d. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam metode ini penulis gunakan untuk meneliti untuk mengumpulkan data dari teknik pengumpulan data, yang dimulai dari wawancara objek penelitian, dilanjutkan observasi dan terakhir dokumen. Selanjutnya metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan juga menguji kredibilitas data yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah didapatkan agar memperoleh kebenarannya dan juga kevalidannya.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Sekolah

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwokerto yang beralamatkan Jalan Gereja No. 20 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. SMP Negeri 2 Purwokerto didirikan pada Tahun 1950 dengan nama SMP Perjuangan atau SMP Republik Indonesia pada tanggal 1 Maret 1950 dengan tanggal SK Pendirian 15 Agustus 1950. Memiliki lahan seluas 9628 m^2 dengan NPWP 36723521000 serta berakreditasi A.

SMP Negeri 2 Purwokerto berdiri di atas tanah dari pemerintah, karena merupakan sekolah negeri, memiliki bangunan yang kokoh dan luas yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang proses belajar mengajar. Selain itu dalam proses belajar mengajar SMP Negeri 2 Purwokerto menggunakan kurikulum 2013, SMP Negeri 2 Purwokerto memiliki lingkungan yang bersih yang menjadikan peserta didik nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran.

SMP Negeri 2 Purwokerto, memiliki guru-guru yang berkompeten dibidangnya agar memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik. Jumlah seluruh guru adalah 49 orang dengan rincian Guru Tetap/PNS berjumlah 44 orang dan untuk Guru Tidak Tetap berjumlah 5 orang. Selanjutnya untuk guru dari segi kualitas atau kemampuannya cukup mumpuni karena kebanyakan dari lulusan sarjana (S1). Sebagian kecil dari lulusan (S2). Seluruh siswa SMP Negeri 2 Purwokerto berjumlah 817 orang untuk periode 2018/2019. Dengan rincian, untuk kelas VII berjumlah 281 orang, kelas VIII berjumlah 267 orang dan kelas IX berjumlah 269 orang.

2. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 2 Purwokerto

Pada tahun 1946 kantor PPK Karesidenan Banyumas berkedudukan di kota Purwokerto yang dipimpin oleh Bapak M. Samadi ini baru memiliki 2

SMP dan 1 sekolah Guru yaitu: SMP Putri Purwokerto, dengan kepala sekolah Bapak Mutari. SMP Putra Purwokerto, dengan kepala sekolah Bapak Imam Soedarti. Pada tanggal 19 Desember 1949 sesudah persetujuan KMD di Den Haag, PPK Karesidenan Banyumas dan segenap stafnya pindah lagi ke Karang Jambu Purwokerto. Disinilah PPK Karisidenan Banyumas dibawah pimpinan Bapak R. Soetojo, memanggil putra-putri pejuang RI yaitu TP, TRIP, dan IMAM untuk kembali ke bangku sekolah dan dibukalah pendaftaran baru dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bagi anak pejuang TP, TRIP dan IMAM tanpa tes.
- b. Anak umum harus mengikuti tes.

Pembuatan bangku-bangku diserahkan kepada Bapak Subechi Kepala ST RI, sedangkan kebutuhan lainnya seperti: papan tulis, meja guru, dll didapat dari pinjaman Residen Banyumas. Setelah semuanya siap maka tanggal 1 Maret 1950 berdirilah SMP yang diberinama “SMP Perjuangan” atau SMP Republik Indonesian (SMP RI) di Purwokerto dengan personalia sebagai berikut:

Kepala Sekolah : R. Soegiharto

Guru-Guru :

- a) S. Tjiptojoewono
- b) S. Gondowarsito
- c) R. Abdulah
- d) Wasis OB.
- e) Masdhuki
- f) R. Racjudi
- g) Soepangat
- h) Budi Sutjiro AS.
- i) Suprpto
- j) Jasiman

Staff Tata Usaha : Soewandhi

Pembantu TU :

- a) Junus Karto
- b) Maderdja
- c) G. Sanbrasi
- d) Sanwikrama

Pada tahun itu terdapat 14 kelas dengan siswa 513 orang dan jam kerjanya sampai dengan pukul 14.00. kondisi peralatan masih sangat sederhana sebagai contoh: alat tulis menulis menggunakan kertas merang, kertas samak dan ditulis dengan tangan termasuk surat menyurat karena belum memiliki mesin ketik, dinding penyekat antar kelas banyak yang bolong, dll.

Dengan adanya surat keputusan Menteri PPK nomor 5595/b tanggal 5 Agustus 1950 maka terhitung mulai tanggal 25 Juli 1950, SMP Perjuangan (SMP RI) berubah menjadi SMP Negeri II Purwokerto di bawah pimpinan Bapak Samuel berdasarkan Skept Nomor 5460/c tanggal 21 Juli 1950 yang berlaku sejak 1 Juli 1950 dan sebagai wakil kepala sekolahnya adalah Soegiharto. Perlu diketahui bahwa di Purwokerto ada SM Recomba 2 Buah yaitu SM I Pool Purwokerto dan SM II Pool Purwokerto.

Selanjutnya SM II Purwokerto menjadi SMP Negeri 1 Purwokerto, SMP RI menjadi SMP 2 Purwokerto dan SM I Purwokerto menjadi SMP Bruderan Bersubsidi Puwokerto. Dengan ketetapan tersebut di atas maka murid-murid SM I Pool Purwokerto diperkenankan mendaftar masuk ke SMP Negeri 2 Purwokerto tanpa syarat dan tercatat sebanyak 156 orang dari kelas I sampai dengan kelas III. Pada ujian Negara tahun ajaran 1948/1950 SMP Negeri 2 Purwokerto dapat meluluskan 100%, karena anak yang mendaftar ujian Negara saat itu hanya 1 orang dan lulus dan bagi anak pejuang diadakan ujian tersendiri.

Pada tahun 1945 terjadi mutasi jabatan yaitu dengan surat keputusan Nomor: 39240/c.I tanggal 7 September 1954. Bapak R. Ng. Gondodiprodo dari SMP Negeri Blora diangkat menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak R. Ng. Gondodiprodo mulai tanggal 1 September 1957 berdasarkan skep Nomor: 95902/CI tertanggal 31 Juli 1957.

Pada tanggal 1 Februari 1968 Bapak Taadi Eddy Sutristijono diangkat menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto dengan skep Nomor: E 5623/c.I tertanggal 31 Juli 1968 menggantikan Ibu Marimak Soeroso yang memasuki masa pensiun.

Pada tanggal 12 April 1984 Bapak Siswadi, BA yang semula guru SMEA Negeri Purwokerto berdasarkan SK Nomor: 26382/C/K.I.2/84 diangkat menjadi kepala SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak Taadi Eddy Sutristijono yang menjadi kepala SMP Negeri 8 Purwokerto.

Bapak Tohir Syahri berdasarkan SK Nomor: 1732/I.03.d1/Ca.3.92 tertanggal 25 April 1992 melanjutkan tugas Bapak Siswadi, BA yang memasuki masa pensiun. Berdasarkan SK Nomor 02392/I.03.dl/Ca.3.94 tertanggal 22 Juni 1994 Bapak Tudiman Ruswijanto KS, BA yang semula kepala SMP Negeri 2 Sumbang diangkat menjadi kepala SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak Tohir Syahri yang memasuki masa pensiun.

Sejak tanggal 1 September 2000 Bapak H. Soenardi yang semula kepala SMP Negeri 2 Ajibarang dengan SK Nomor: 8212/005/2003 tertanggal 15 Januari 2003 Bapak H.M.Ardani, M.Pd yang semula kepala SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak H. Soenardi yang memasuki masa pensiun.

Mulai tahun pelajaran 2004/2005 SMP Negeri 2 Purwokerto dipercaya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Program Kelas Imersi sebagai program Unggulan Pemda Provinsi Jawa Tengah. Keunggulan kelas imersi adalah di dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris pada mata pelajaran Matematika, IPA (Biologi dan Fisika), IPS (Sejarah, Ekonomi dan Geografi), dan Kesenian (Seni Music dan Seni Rupa).

Mulai tahun pelajaran 2007/2008 SMP Negeri 2 Purwokerto di percaya oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyelenggarakan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Semua siswa RSBI dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan materi berbahasa Inggris untuk mata pelajaran Matematika, IPA dan TIK. Hasilnya

cukup memuaskan, lulusan siswa RSBI angkatan pertama memiliki rata-rata nilai ujian Nasional tertinggi di Kabupaten Banyumas, dan peringkat 8 sekolah negeri se Provinsi Jawa Tengah.

Sejak 15 Oktober 2010 Bapak Daud Dwi Sudarto, M.Pd. yang semula sebagai kepala SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak HM. Ardani, M.Pd yang telah selesai masa jabatan menjadi kepala sekolah. Selanjutnya Berdasarkan SK Bupati banyumas Nomor. 526 Tahun 2014, dan terhitung mulai tanggal 28 Maret 2014 yaitu Bapak Drs. M. Djohar, M.Pd sebagai kepala SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak Daud Dwi Sudarto, M.Pd. yang telah selesai masa bakti Kepala Sekolah dan menjadi guru di SMP Negeri 7 Purwokerto.

3. Visi dan Misi, Tujuan SMP Negeri 2 Purwokerto

a. Visi Sekolah

“MODERN, UNGGUL, HANDAL BERWAWASAN
INTERNASIONAL”

(“MODERN EXCELLENCE AND INTEGRITY WITH AN
INTERNATIONAL OUTLOOK”)

b. Indikator Visi :

1. Terwujudnya kurikulum dan SKL, satuan pendidikan bertaraf Internasional.
2. Terwujudnya siswa yang unggul dalam lomba-lomba tingkat provinsi, nasional dan Internasional.
3. Terwujudnya proses pembelajaran bertaraf Internasional.
4. Terwujudnya tenaga pendidik dan kependidikan yang menguasai ICT dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Internasional.
5. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran bertaraf Internasional.
6. Terwujudnya manajemen bertaraf Internasional.
7. Terwujudnya pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien.
8. Terwujudnya perangkat penilaian bertaraf Internasioal.

9. Terwujudnya derajat keimanan warga sekolah yang kuat serta berkepribadian yang mulia dalam berbudaya di sekolah.
10. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, rapi, indah, rindang, dan aman.

c. Misi Sekolah

1. Mewujudkan derajat keimanan peserta didik yang kuat serta berkepribadian yang mulia.
2. Mewujudkan sikap dan perilaku peserta didik yang demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi HAM.
3. Mewujudkan lingkungan yang rindang, bersih, nyaman, dan aman untuk kegiatan proses belajar mengajar.
4. Mewujudkan kebiasaan hidup bersih bagi siswa dan warga sekolah.
5. Membantu siswa mengembangkan keilmuan secara optimal.
6. Mewujudkan keilmuan yang bertaraf Internasional.
7. Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam lomba-lomba akademis dan non akademis yang bertaraf regional, nasional dan Internasional.
8. Mewujudkan pembelajaran yang mampu menumbuhkan kreatifitas peserta didik.
9. Mewujudkan pembelajaran yang mampu membutuhkan kemampuan menganalisa, sintesa serta mencipta sebagai penerapan pebelajaran berbasis *High Order Thinkign Skills* (HOTS).
10. Mewujudkan pembelajaran yang mengimplementasikan pendidikan karakter sebagai dasar mencetak pelaku-pelaku sejarah menyongsong tahun Indonesia Emas.
11. Mengimplementasikan penilaian yang akuntabel.
12. Mewujudkan pembelajaran berbasis TIK.
13. Mewujudkan kemampuan peserta didik dalam pemanfaatan TIK secara baik dan selektif.
14. Mewujudkan peserta didik yang menguasai dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

15. Mewujudkan kemampuan peserta didik dalam mencipta dan berkreasi berbasis teknologi.
 16. Mewujudkan kurikulum dan SKL berstandar Nasional dengan pengembangan dari sekolah-sekolah yang bertaraf Internasional.
 17. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan bahasa Inggris secara intensif.
 18. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi aktif dengan menggunakan bahasa asing khususnya; Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, Bahasa Inggris.
 19. Memberikan pengetahuan dan pemahaman akan budaya-budaya asing khususnya; budaya Jepang, Mandarin, Korea, Arab, dan Inggris.
 20. Meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bahasa Inggris.
 21. Mewujudkan sarana prasarana pembelajaran sesuai standar nasional dengan pengembangan bertaraf Internasional.
 22. Mewujudkan manajemen bertaraf Internasional.
 23. Melaksanakan anggaran pendidikan secara efektif dan efisien mewujudkan pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien.
4. Struktur Organisasi
- Kepala Sekolah : Bayu Heryanto, S.Pd.
- Wa.Ka.I : Riyadi Seyarsono, S.Pd.
- Wa.Ka.II : Drs. Sukiman
- Ur. Kurikulum : Waryanto, S.Pd.
- Ur. Sarpras : Saliman, S.Pd.
- Ur. Kesiswaan : Drs. Sukiman
- Ur. Humas : Qoyum A, S.Pd.I.
- Wali Kelas
- Guru Mapel/BK
- Siswa

5. Keadaan Siswa SMP Negeri 2 Purwokerto

Peserta didik adalah seseorang yang yang memerlukan bimbingan serta mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran, serta jenis jenjang pendidikan. Peserta didik merupakan sebagai pelaku pencari, menerima, serta menyimpan dari proses pembelajaran serta mengembangkan potensi yang dimiliki dan membutuhkan seorang pendidik/guru.

Peserta didik merupakan unsur yang harus ada dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya peserta didik pembelajaran tidak dapat dilakukan. Tujuan pembelajaran akan dapat tercapai jika peserta didik berusaha secara aktif untuk tercapainya pesera didik yang aktif.

Tahun Pelajaran	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah	
	Jml siswa	Jml kelas	Jml siswa	Jml kelas	Jml siswa	Jml kelas	Jml siswa	Jml kelas
2013/2014	257	8	203	8	202	8	662	24
2014/2015	262	9	257	9	203	8	722	26
2015/2016	295	9	261	9	257	9	813	27
2016/2017	277	9	292	9	262	9	813	27
2017/2018	272	8	274	8	292	9	838	25
2018/2019	281	9	267	8	269	8	817	25

Tabel1 Keadaan siswa di SMP Negeri 2 Purwokerto

6. Keadaan Guru dan Karyawan

Guru adalah seseorang yang memberikan pengajaran kepada peserta didik atau murid. Guru merupakan sebagai penentu dalam mencapai tujuan pendidikan, guru harus mempunyai skill dan pengetahuan yang luas dalam membimbing serta membantu dalam mengembangkan potensi peserta didik atau murid.

Dalam guru memiliki tugas mengajar, mengatur, mengorganisasi lingkungan dan peserta didik sehingga untuk mendorong peserta didik

melakukan proses belajar. Mengajar merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses memperoleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan Status Guru						Jumlah		
		GT/PNS		GTT		Guru Bantu				
		L	P	L	P	L	P	L	P	J
1	S3/ S2	2	2					2	2	4
2	S1/ D4	16	23	2	3			18	26	44
3	D3/ Sarmud		1					-	1	1
4	D2							-	-	-
5	D1							-	-	-
6	SMA Sederajat							-	-	-
Jumlah		18	26	2	3	-	-	20	29	49

Tabel 2 Kualifikasi pendidikan

IAIN PURWOKERTO

No	Guru Mapel	Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan SESUAI dengan tugas mengajar				Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK SESUAI dengan tugas mengajar				Jml
		D1/ D2	D3/ Sar mud	S1/ D4	S2/ S3	D1/ D2	D3/ Sar mud	S1/ D4	S2/ S3	
1	IPA			6					6	
2	MTK			5					5	
3	B.Indonesia			5	1				6	
4	B. Inggris			4	1				5	
5	Pend. Agama		1	2	1				4	
6	IPS			5					5	
7	Penjaskes			3					3	
8	Seni Budaya			3					3	
9	PKn			3					3	
10	TIK/ Komputer			1	1				2	
11	BK			4					4	
12	Mulok/Bhs. Jawa			1	1				2	
13	Lainnya			1					1	
Jumlah		-	1	43	5	-	-	-	-	49

Tabel 3 Jumlah Guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)

7. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Sarana merupakan suatu alat yang dipakai untuk mencapai tujuan. sedangkan prasarana merupakan sebagai penunjang untuk terselenggaranya suatu proses dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana merupakan

sebagai fasilitas pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat yang berguna untuk memberi kemudahan dalam melaksanakan suatu kegiatan.

No.	Fasilitas	Jumlah Ruang
1	Ruang Kelas	27
2	Perpustakaan	1
3	Laboratorium Fisika	1
4	Laboratorium Bahasa (Mobile)	1
5	Ruang PTD	1
6	Laboratorium Biologi	1
7	Laboratorium ICT/Komputer	2
8	Ruang Kesenian dan Karawitan	1

Tabel 4 Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 2 Purwokerto

8. Prestasi SMP Negeri 2 Purwokerto

Sekolah mampu mencapai prestasi dalam bidang akademik dan non akademik dan memiliki integritas yang tinggi. Prestasi belajar menggambarkan keberhasilan belajar mengajar.

Tahun pelajaran	Peringkat
2012/2013	1
2013/2014	1
2014/2015	1
2015/2016	1
2016/2017	1
2017/2018	1

Tabel 5 Peringkat UN Kabupaten 5 Tahun Terakhir

Sedangkan kejuaraan akademik dan non akademik yang diraih oleh SMP Negeri 2 Purwokerto yaitu sebagai berikut:

- a. Juara II LCC Mapel Tingkat Provinsi 2015.
- b. Juara 1 KIR Tingkat Kabupaten 2015.
- c. Juara 1 Pidato Tingkat Kabupaten Tahun 2015.
- d. Juara 1 Baca Puisi Tingkat Kabupaten Tahun 2015.
- e. Juara 1 Musikalisasi Puisi Tingkat Kabupaten Tahun 2015.
- f. Juara 1 Pencaksilat Tingkat Provinsi Tahun 2015.
- g. Meraih Medali Emas pada olimpiade Sains Nasional tingkat SMA di Palembang Tahun 2016.
- h. Juara 1 Nyanyi Tunggal FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2016.
- i. Finalis Atletik Tingkat Nasional Tahun 2016.
- j. Juara 2 Tari FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2016.
- k. Terbaik III Lomba Tata Kelola Mutu Sekolah Tingkat SMP Tahun 2017.⁸⁹

B. Penyajian Data

1. Formulasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter

Formulasi kebijakan yang baik merupakan berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Para pengambil keputusan sering sekali beranggapan bahwa formulasi yang baik itu adalah suatu uraian yang berhubungan dengan pesan-pesan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan berpegang teguh pada norma atau aturan, namun tidak membumi. Formulasi kebijakan dilakukan dengan cara memperhatikan penyusunan agenda dikarenakan semua berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Perencanaan dalam kebijakan diawali dari tujuan kebijakan. Dalam keberhasilan sekolah itu tergantung dari pemimpin sekolah yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu untuk membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan, dan kepala sekolah juga harus bertanggungjawab atas

⁸⁹ Dokumentasi di SMP Negeri 2 Purwokerto, pada tanggal 17 desember 2018.

keberhasilan yang telah dicapai semua pengaturan dan pengelolaan secara formal.

Kebijakan secara lisan yaitu dilaksanakan setiap hari yaitu penegakkan kedisiplinan dan tata tertib siswa termasuk guru dan karyawan, dalam pendidikan karakter terdapat aspek kedisiplinan, sopan santun, tata tertib, peduli lingkungan, sholat berjamaah.⁹⁰

Pendidikan karakter yang diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran, tata tertib, dan dari berbagai visi dan misi beserta tujuan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik, dengan tujuan yaitu untuk mendidik seperti penyempurnaan diri individu yang diperuntukkan bagi generasi selanjutnya.

Dalam meningkatkan pendidikan karakter yang perlu dipersiapkan yakni:

Yang dipersiapkan yaitu kurikulum, tiap-tiap guru memasukan pendidikan karakter pada setiap pembelajaran yang dimasukkan dalam RPP. Pada saat pelaksanaan harus punya komitmen dalam melaksanakan pendidikan karakter, setiap pembelajaran sudah berbasis karakter.⁹¹

Kebijakan kepala sekolah merupakan suatu ketentuan kepemimpinan pendidikan yaitu kepala sekolah yang merupakan rangkaian dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam kebijakan berorientasi pada suatu pelaksanaan dan evaluasi. Formulasi kebijakan ini dilakukan bisa memperhatikan penyusunan agenda karena semuanya berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Acuannya pada program-program, yang diambil dari para pendapat guru dan siswa yang menjadikan program.⁹²

Proses formulasi kebijakan kepala sekolah dalam lembaga ini yakni sekolah yang berbasis RSBI, siswa mampu menghafal Al Qur'an juz 30 dan juz 29. Mengembangkan kepribadian, menghasilkan peserta didik yang

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Bayu Heryanto (sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Purwokerto), pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Riyadi Setyarsono (sebagai Waka Kurikulum di SMP Negeri 2 Purwokerto), pada tanggal 4 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

⁹² Wawancara dengan Bapak Bayu Heryanto (sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Purwokerto), pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

berhasil dalam menjuarai kelombaan, pengembangan bahasa asing yang meliputi Bahasa Inggris, Bahasa Korea, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa mandarin. Program selanjutnya TOEFL dilaksanakan khusus untuk kelas IX yaitu dapat membuat peserta didik bersaing dalam era globalisasi.

Sekolah berbasis RSBI merupakan sekolah yang bertaraf Internasional yang memiliki banyak prestasi dibidang akademik maupun non akademik. Sedangkan untuk kegiatan menghafal Al Qur'an khususnya juz 29 dan juz 30 yakni program unggulan yang berada di SMP Negeri 2 Purwokerto yang memiliki tujuan untuk menghasilkan peserta didik Yang bisa menghafal Al Qur'an yaitu juz 29 dan juz 30.

Mengembangkan kepribadian merupakan program unggulan yakni membentuk karakter peserta didik yang baik atau akhlak mulia. Hal ini tercermin pada sikap serta perilaku yang dilakukan sehari-hari yang dilakukan oleh warga sekolah. Peserta didik membiasakan diri dengan melaksanakan budaya-budaya atau kebiasaan yang ditanamkan serta dilakukan sehari-hari.

Selanjutnya menjuarai kompetisi atau lomba-lomba yakni sekolah memiliki kualitas yang tinggi dan baik yang artinya diwujudkan dalam bentuk pencapaian prestasi-prestasi baik dibidang akademik maupun non akademik. Kepala sekolah mendukung dengan kegiatan peserta didik yang terkait dengan prestasi.

Program selanjutnya TOEFL merupakan kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan pada waktu ekstrakurikuler dengan TOEFL, dengan TOEFL peserta didik bisa bersaing di era globalisasi pendidikan. Nilai TOEFL yakni sebagai salah satu faktor yang dapat menentukan kemenangan dalam persaingan global.

2. Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam meningkatkan Pendidikan Karakter

Setelah merumuskan kebijakan, selanjutnya melaksanakan implementasi dari kebijakan yang sudah dirumuskan. Implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian kegiatan suatu setelah kebijakan

dirumuskan yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dari hasil keputusan.

Pendidikan juga bisa dipandang sebagai sosialisasi, pendidikan karakter diperlukan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga siswa paham tentang mana kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mana kebiasaan yang buruk serta siswa mampu merasakan nilai-nilai yang baik. Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan, kepala sekolah menjabarkan kebijakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan program-program unggulan.

Kebijakan kepala sekolah diimplementasikan oleh kegiatan-kegiatan-kegiatan yang dijabarkan lagi kedalam beberapa kegiatan pengembangan diri yaitu *Pertama*, terdapat kegiatan pelayanan konseling yang terdiri dari masalah dari pribadi dan kehidupan sosial, belajar serta pembentukan karier. *Kedua*, merupakan kegiatan pengembangan pribadi dan kreatifitas peserta didik yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yaitu dari kegiatan keagamaan, keolahragaan, kepemimpinan, seni, dan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR). *Ketiga*, terdapat kegiatan pengembangan diri yang dilakukan melalui pembiasaan yaitu terdiri dari a) Jum'at sehat, jalan sehat (olahraga bersama) yang dilakukan oleh semua warga sekolah. b) Jum'at bersih, merupakan kegiatan bersih-bersih yang di kelas maupun di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh semua warga sekolah. c) Kelas inspirasi, merupakan kegiatan yang diisi oleh wali murid di kelas masing-masing yang artinya wali murid memberikan motivasi atau menceritakan perjuangannya. d) Kegiatan selanjutnya terdapat kegiatan tadarus setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai selama 15 menit yang dibimbing oleh guru yang mengajar di jam pertama. e) Melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di masjid yang berada di sekolah, dan menyanyikan lagu-lagu nasional setiap pagi dan lagu-lagu daerah setelah setiap siang dilakukan saat pembelajaran selesai.

Selanjutnya program-program yang dijabarkan lagi kedalam beberapa program unggulan, yaitu *Pertama*, Program tahfidz yaitu program menghafal al Qur'an juz 29 dan juz 30 yang dilaksanakan setiap hari senin pada kegiatan

ekstrakurikuler keagamaan yang diikuti oleh peserta didik yang beragama Islam, peserta didik dikelompokkan menjadi bagian yang terdiri dari; 1) Kelas iqra, kelas dimana peserta didik belum bisa membaca Al Qur'an. 2) Kelas tahfidz, merupakan kelas untuk menghafal al Qur'an dan kelas tahfidz dibagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan tujuan agar lebih efektif, setiap kelompok memiliki satu pendamping ustadz atau ustadzah. 3) Kelas Qari'ah, merupakan kelas yang memiliki suara bagus dalam membaca Al Qur'an. *Kedua*, program pengembangan karakter (penanaman budi pekerti dan akhlak mulia) yang dilakukan melalui kegiatan pembiasaan yaitu antara lain; berjabat tangan dengan guru saat peserta didik hadir di sekolah pada waktu pagi hari, mengucapkan salam dan berjabat tangan saat bertemu guru, makan siang bersama yang diawasi oleh wali kelas dan dilanjut setelah makan siang selesai peserta didik tempat makan masing-masing, selanjutnya melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di masjid yang berada di sekolah, kebersihan kelas dan lingkungan sekolah secara bersama-sama (gotong royong), olahraga secara bersama (jalan sehat) seluruh warga sekolah, mengerjakan soal dengan jujur, dan ketika menemukan barang temuan, peserta didik langsung memberikan kepada guru atau staff lainnya agar segera diumumkan.

Ketiga, menjuarai lomba-lomba atau kompetisi-kompetensi dibidang akademik maupun non akademik. *Keempat*, program selanjutnya yaitu pengembangan bahasa dimana SMP Negeri 2 Purwokerto memiliki 5 (lima) pengembangan bahasa yang terdiri dari Bahasa Inggris, Bahasa Korea, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab dan terdapat bimbingan TOEFL yang dilakukan oleh peserta didik kelas IX.

Bahasa Inggris (bekerjasama dengan UMP), bahasa Arab (Bekerjasama dengan IAIN Purwokerto dan Pesantren), bahasa Mandarin (bekerjasama dengan unsoed), bahasa jepang (bekerjasama dengan biro pengembangan bahasa), bahasa korea (bekerjasama dengan unsoed). Untuk tesnya sendiri menggunakan tofel yang siwa kelas 9 sudah pelajari.⁹³

⁹³ Wawancara dengan Bapak Bayu Heryanto (sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Purwokerto), pada tanggal 21 januari 2019, puku 09.00.

Dalam pelaksanaan kebijakan, aspek yang terpimpin yakni pemimpin, karena pemimpin menjadi kunci keberhasilan dari sesuatu kebijakan. Semakin baik dalam manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah maka hasil yang diperoleh akan baik pula. Jadi pelaksanaan kebijakan yakni secara langsung mengimplementasikan program-program unggulan dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dalam pembelajaran siswa diberi kegiatan pembiasaan yang nantinya harus diisi ketika sudah sampai di rumah dan diawasi juga oleh orang tua.

Secara keseluruhan baik siswa atau guru, kita harus sudah mencontohkan buat sekolah-sekolah lain. Sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto menjadi piloting proyek sekolah PPK (Penguatan Pendidikan Karakter), sekolah ini merupakan sekolah rujukan Nasional sehingga kita berusaha mungkin ada siswa-siswa yang memiliki karakter yang baik. Dan itu saya kira sudah bukan penilaian dari kita tetapi kita mendapatkan penilaian dari luar. Kita memang melakukan pendidikan karakter secara maksimal sebagai buktinya adalah kita sudah 3 tahun mendapatkan integritas, sekolah ini mendapatkan penghargaan merupakan hasil UN yang memenuhi kriteria bahwa kita itu terpercaya jadi integritas sekolah ini sudah teruji, kejujuran dari pelaksanaan UN itu menjadi tolak ukur pertama anak itu memiliki karakter yang jujur yang penilaian bukan dari sekolah tetapi Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan) sehingga mereka mengakui bahwa memiliki integritas memiliki kejujuran dalam mengerjakan UN.⁹⁴

Integritas merupakan nilai karakter yang memperdalam, memperluas dan menyesuaikan dari program-program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Integrasi yang baik dari diperoleh dari berbagai prestasi dibidang akademik maupun non akademik.

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter memiliki faktor penghambat yaitu:

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Waryanto (sebagai Guru PKn di SMP Negeri 2 Purwokerto), pada tanggal 5 januari 2019, pukul 09.00 WIB.

Dari kurikulum itu tidak ada hambatannya, kecuali dalam pelaksanaannya dimasing-masing individu terkendala. Dalam pendidikan yang berpengaruh itu ada 3 yaitu lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Sekolah sudah di tanamkan karakter, sedangkan di lingkungan keluarga masih mengabaikan sisi yang lain.⁹⁵

Pada dasarnya pendidikan karakter itu adalah lingkungan keluarga. Tetapi pendidikan karakter di sekolah sangat penting bagi peserta didik. Suatu batasan pendidikan karakter utamanya harus menanamkan melalui keluarga. Keberhasilan implementasi kebijakan yang tidak terlepas dari peran gurur dan sistem yang mendorong motivasi peserta didik serta komitmen guru. Sumber daya yang sudah tersedia yaitu untuk menentukan bagaimana pelaksanaan program pendidikan karakter.

3. Evaluasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam meningkatkan Pendidikan Karakter

Penilaian kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Kebijakan diperlukan untuk melihat apakah program yang sudah dijalankan yang diharapkan, penilaian kebijakan berfungsi untuk melihat dari sebab-sebab kegagalan dari kebijakan atau untuk mengetahui kebijakan yang telah dijalankan apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Selain dengan diadakannya apel pagi (rapat pagi), kepala melakukan pengawasan serta pengontrolan terhadap kebijakan yaitu apakah program serta kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan berjalan dengan apa yang direncanakan.

Perumusan kebijakan membuat kebijakan melalui rapat dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan staff karyawan dan nanti dibicarakan antara sepakat dan munfakat, rapat pagi diadakanya dimulai jam 07.00-07.15 itu namanya ape pagi yang berisi briefing dan pembinaan, rapat ke waktu yang lebih lama yang dilaksanakan pada siang hari atau bisa setelah selesainya pembelajaran, rapat diadakan ketika ada yang harus dibicarakan bersama diantaranya PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), PTS (Penilaian Tengah Semester), Penilaian Akhir Semester, dan Kenaikan Kelas, dll. Jadi rapat

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Riyadi Setyarsono (selaku Waka Kurikulum di SMP Negeri 2 Purwokerto), pada tanggal 4 januari 2019, pukul 09.00 WIB.

dilaksanakan sesuai dengan situasional dan keperluan. Apel pagi merupakan evaluasi kegiatan hari sebelumnya, sebagai informasi, dan pembinaan.⁹⁶

Dalam kegiatan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang membandingkan apa yang telah dilaksanakan dengan apa yang telah direncanakan. Pada dasarnya tujuan dari pengawasan yaitu sebagai suatu kegiatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan yang sudah direncanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengontrolan yang berfungsi untuk mengetahui kesalahan-kesalahan awal yang masih bisa diperbaiki yang sesuai dengan yang sudah direncanakan dan tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian berfungsi untuk menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga dapat mengurangi kendala yang lebih besar serta menjaga kebijakan yang sudah direncanakan dan sedang dilaksanakan sesuai dengan sasaran.

Selanjutnya pengembangan kurikulum yang berbasis karakter, yang berfungsi untuk mencetak dan mengembangkan karakter siswa. Dalam mengembangkan pendidikan karakter bisa menggunakan program-program pendidikan.

Evaluasi secara khusus mungkin tidak ada kegiatan, tetapi ada evaluasi untuk semuanya kalau dalam manajemen yaitu analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya termasuk didalamnya apakah program penguatan pendidikan karakter di sekolah ini sudah berjalan baik atau belum yang dilakukan setiap tahun.⁹⁷

Proses evaluasi di sekolah menunjukkan bahwa kegiatan dan program-program yang sudah diimplementasikan dinilai dengan rapat pagi yang membahas hasil kemarin dengan tujuan agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Evaluasi terkait kebijakan yang bermanfaat untuk memberikan kritik dan saran dalam proses pengambilan kebijakan

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Bayu Heryanto (sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Purwokerto), pada tanggal 21 januari 2019, pukuL 09.00 WIB.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Waryanto (sebagai Guru PKn di SMP Negeri 2 Purwokerto), pada tanggal 5 januari 2019, pukuL 09.00 WIB.

kedepannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan menjadi lebih baik kedepannya. Evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk introspeksi.

Tujuan pokok dari evaluasi kebijakan pendidikan adalah bukan untuk disalah-salahkan melainkan untuk melihat pencapaian dan harapan suatu kebijakan pendidikan. Selanjutnya dalam evaluasi berfungsi untuk mencari kekurangan dan menutupi kekurangan.

C. Analisis Data

1. Formalisasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter

Kebijakan merupakan suatu aturan atau ketetapan yang dioperasikan dalam lembaga pendidikan sebagai perencanaan untuk mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa terwujud. Kebijakan adalah aturan yang berasal dari pemerintah yang mengimplementasikan program dalam lembaga pendidikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya perumusan kebijakan perubahan pendidikan kearah yang lebih baik dapat dilakukan dengan berbagai uapaya, dengan menciptakan tempat yang baik untuk memeperoleh ilmu pengetahuan, serta berbagai norma serta etika.

Berdasarkan penyajian data di atas, dalam memformulasikan kebijakan yaitu dengan memperhatikan dalam penyusunan agenda karena seluruhnya masih berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan kepala sekolah sudah meningkatkan pendidikan karakter di Sekolah dengan menerapkan program-program, kegiatan-kegiatan dan berdasarkan dari visi dan misi sekolah. dalam hal ini program-program yang telah direncanakan telah mendapatkan dukungan penuh dari guru, karyawan, orang tua, dan peserta didik. selain itu prestasi-prestasi di SMP Negeri 2 Purwokerto memiliki banyak prestasi baik dibidang akademik maupun non akademik. Program-program yang direncanakan dengan matang sudah berjalan dengan baik dan untuk hambatannya sendiri tidak memiliki hambatan dalam menjalankan program tersebut.

Untuk program-program unggulan yaitu kegiatan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dalam aspek religi, budi pekerti, sosial, ekonomi,

nasionalisme, integritas, dan teknologi yang bermanfaat bagi perkembangan kompetensi peserta didik. program-program unggulannya yang terdiri dari Tahfidz Al Qur'an (menghafal Al Qur'an) sebanyak 2 juz yaitu juz 29 dan 30, selain itu program unggulan lainnya yaitu membentuk karakter yang baik atau akhlak mulia, terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi atau olimpiade, literasi, pengembangan bahasa (Bahasa Inggris, Bahasa Korea, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, dan Bahasa Mandarin), dan selanjutnya program unggulan lainnya yaitu TOEFL. Selain program-program unggulan SMP Negeri 2 Purwokerto memiliki kegiatan pengembangan diri, yaitu terdiri dari kegiatan pelayanan konseling, kegiatan pengembangan pribadi dan kreatifitas siswa, kegiatan pengembangan diri yang melalui kegiatan pembiasaan yaitu antara lain jum'at sehat, jum'at bersih, kelas inspirasi, tadarus.

Sedangkan dari visi misi yaitu beriman dan unggul yang memiliki kaitannya dengan meningkatkan pendidikan karakter yaitu beriman yang artinya mencerminkan sikap dan perilaku sehari-hari yang ditunjukkan oleh warga sekolah. Unggul yang artinya memiliki kualitas yang diwujudkan dalam prestasi di bidang akademis maupun non akademis.

Tata tertib siswa merupakan suatu rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bercakap, bertindak, serta melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dengan tujuan bisa membuat peserta didik disiplin dan menciptakan iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran secara efektif.

2. Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter

Kepala sekolah yaitu sebagai manajer yang ditunjukkan untuk mengelola manajemen terbuka, jadi mengelola yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan pendidikan karakter dalam pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan penilaian. Dalam melaksanakan kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter yaitu dengan menjalankan program-program yang telah diformulasikan.

Program-program pembiasaan akhlak yang baik yaitu dari mulai awal masuk sekolah jam 07.00 guru menyambut siswa dan siswa berjabat tangan, sebelum pelajaran siswa bisa melaksanakan sholat dhuha, dan dilanjutkan dengan membaca al Qur'an 15 menit sebelum pelajaran yang diawasi oleh guru jam pertama dan selesai membaca al Qur'an siswa melanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional, melaksanakan sholat dzuhur berjamaah, dan sebelum pelajaran selesai siswa menyanyikan lagu daerah. Program selanjutnya ada kegiatan penguatan pendidikan karakter yaitu ada kegiatan pembiasaan siswa yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur. Jadi program ini bekerjasama dengan guru BK yang dikumpulin satu bulan sekali dan juga orang tua ikut andil dalam kegiatan tersebut, dikarenakan orang tua yang menceklist apakah anaknya telah melaksanakan kegiatan tersebut apa sebaliknya.

Program selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler, dalam program ekstrakurikuler pada awal masuk sekolah diawal ajaran baru jadi minggu pertama siswa didataa pemilihan eskul apa yang akan diambil, minggu kedua siswa mulai ditempatkan pada eskul yang dipilih, selanjutnya pada minggu ketiga siswa mulai bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler setelah melaksanakan pembelajaran yaitu dimulai jam 14.00 WIB sampai selesai. Program selanjutnya religius dilaksanakan setiap hari senin yang kegiatan diawali dengan pendataan peserta didik guna membentuk kelompok berdasarkan kemampuan membaca Al Qur'an, peserta didik dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu kelas iqra, kelas baca Al Qur'an, kelas Tahfidz, kelas Qiroah.

Program selanjutnya pengembangan bahasa dan TOEFL, di SMP Negeri 2 Purwokerto memiliki 5 pengembangan bahasa yang terdiri dari Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea, Bahasa Arab, jadi semua peserta didik mengikuti program pengembangan bahasa sesuai dengan pilihan. Selain pengembangan bahasa terdapat bimbingan TOEFL yang dilaksanakan khusus kelas IX. Selain program ini di SMP

Negeri 2 Purwokerto terdapat program kelas Inspirasi jadi orang tua siswa mengisi di kelas yaitu perwakilan orang tua siswa bisa mengisi terkait perjuangannya atau kisah apapun yang mana nantinya bisa memotivasi siswa. Kelas inspirasi dilaksanakan pada hari jum'at yang diadakannya satu bulan sekali. Selanjutnya ada buku prestasi membaca al Qur'an bagi siswa. Program unggulan lain yaitu peningkatan nilai ujian nasional target rata-rata 90,20.

Implementasi kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah yang diambil dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut merupakan secara langsung mengimplementasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan. Dalam pelaksanaan kebijakan tidak ada hambatan dan semua program-program sudah terealisasi. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan juga terealisasi dengan baik.

Pada dasarnya kepala sekolah dan guru mempunyai harapan agar peserta didik memiliki rasa nyaman ketika berada di sekolah dengan kasih sayang dari bapak dan ibu guru. Dari pihak sekolah tetap berusaha bagaimana ke depannya bisa semakin maksimal dalam pencapaian yang diharapkan.

3. Evaluasi Kebijakan kepala Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter

Kepala sekolah melakukan pengawasan serta pengontrolan terhadap kebijakan yaitu apakah program serta kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan berjalan dengan apa yang direncanakan. Evaluasi ini menggunakan strategi rapat (apel pagi), kegiatan ini berfungsi untuk mengetahui apakah program-program atau kegiatan-kegiatan (akademik dan non akademik) berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Apel pagi merupakan evaluasi kegiatan dihari sebelumnya, kegiatan apel pagi ini digunakan sebagai informasi, dan pembinaan.

Selain apel pagi kepala sekolah juga mengadakan rapat untuk kepentingan yang lain seperti yang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester dll. Jadi rapat menggunakan waktu situasional yaitu sesuai kondisi. Evaluasi program-

program bisa dilihat dari indikator keberhasilan yaitu peserta didik mampu menghafal dua juz yang terdiri dari juz 29 dan juz 30, untuk pembiasaan akhlak yang baik peserta didik sudah membiasakan diri untuk melaksanakan budaya ataupun kebiasaan yang ditanamkan sehari-hari, dalam prestasi atau olimpiade siswa mendapatkan prestasi yang berhasil masuk ke tingkat nasional, semua peserta didik mengikuti program pengembangan bahasa sesuai dengan pilihan dan dalam penembangan bahasa asing yang paling banyak diminati oleh peserta didik yaitu pengembangan bahasa Inggris, dan semua peserta didik kelas IX mengikuti program TOEFL dan mendapatkan skor rata-rata 500, dengan adanya TOEFL peserta didik bisa bersaing dalam era globalisasi pendidikan dimana nilai TOEFL bisa menjadi faktor yang dapat menentukan kemenangan dalam persaingan global.

Kebijakan pendidikan terdiri dari ketetapan, yang diawali dari perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu dalam evaluasi pembelajaran juga terdapat penilaian dalam pembelajaran terkait pendidikan karakter yaitu dengan pembiasaan program dari guru BK yaitu siswa mengisi (menceklis) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada saat berada di rumah, jadi dalam program ini sekolah memiliki hubungan dengan orang tua dan juga sekolah bisa memantau ketika siswa berada di rumah. Program pembiasaan tersebut akan diperiksa satu bulan sekali oleh guru BK dan setiap seminggu sekali kartu kegiatan tersebut di tanda tangani oleh orang tua peserta didik. jadi setiap bulannya dikumpulkan untuk diperiksa hasil kartu kegiatan pembiasaan oleh guru BK.

Untuk mengetahui implemntasi berjalan dengan baik bisa dilihat dari indikator keberhasilannya semua program yang sudah dilaksanakan yaitu anak bisa menghafal al Qur'an juz 29 dan juz 30, peserta didik sudah membiasakan diri dalam melaksanakan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang telah ditanamkan dan dilakukan sehari-hari, selanjutnya peserta didik yang berhasil masuk ke tingkat nasional dalam olimpiade, peserta didik yang menjadi juara 1 tingkat kabupaten dalam kompetensi dalam bidang akademis maupun non akademik, semua peserta didik

mengikuti program pengembangan bahasa sesuai dengan pilihan, dan untuk semua peserta didik kelas IX dalam mengikuti TOEFL dan mendapatkan skor rata-rata 500.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

SMP Negeri 2 Purwokerto mempunyai label sebagai piloting proyek Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di karenakan sekolah ini mempunyai prestasi dan memiliki integritas yang tinggi. Kebijakan kepala sekolah di SMP Negeri 2 Purwokerto dalam meningkatkan pendidikan karakter yaitu acuannya pada program-program yang telah disaring dari beberapa pendapat guru-guru dan siswa. Membuat siswa memiliki akhlak yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

Formulasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto merupakan suatu ketentuan kepemimpinan pendidikan yaitu kepala sekolah yang merupakam rangkaian dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dapat dikelompokkan kebijakan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, kebijakan pembiasaan akhlakul karimah, dan hubungan kemitraan sekolah dengan masyarakat. Dengan merumuskan dalam program-program unggulan, kegiatan-kegiatan serta visi misi.

Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto adalah latar belakang kebijakan terkait dengan meningkatkan pendidikan karakter peserta didik pada program-program unggulan dan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah dan hubungan dengan masyarakat yaitu perlunya dalam meningkatkan pendidikan karakter di sekolah yaitu menanamkan karakter pada kegiatan pembelajaran yang berada di dalam kelas dikarenakan pembelajaran merupakan ruh dari pendidikan. Selain di sekolah menanamkan pendidikan karakter bisa juga di rumah dengan diawasi oleh orang tua, jadi orang tua bisa memantau anak-anaknya ketika berada di rumah dengan mengisi kegiatan pembiasaan dari guru BK.

Kepala sekolah ingin peserta didik memiliki kebiasaan akhlak yang baik. Selanjutnya hubungan masyarakat, kepala sekolah ingin peserta didik dapat bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan masyarakat dimanapun peserta didik berada.

Evaluasi Kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto menggunakan strategi rapat (apel pagi), kegiatan ini berfungsi untuk mengetahui apakah program-program atau kegiatan-kegiatan (akademik dan non akademik) berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Apel pagi merupakan evaluasi kegiatan dihari sebelumnya, kegiatan apel pagi ini digunakan sebagai informasi, dan pembinaan.

Selain apel pagi kepala sekolah juga mengadakan rapat untuk kepentingan yang lain seperti yang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester dll. Jadi rapat menggunakan waktu situasional yaitu sesuai kondisi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah

Sebagai pemimpin di sekolah dan juga sebagai pembuat kebijakan, seharusnya kepala sekolah harus lebih mengawasi kembali program-program yang sedang berjalan agar bisa berjalan dengan baik.

2. Waka Kurikulum

Sebagai pelaksana dan pengola dalam kurikulum, seharusnya lebih mengayomi serta memfasilitasi guru yang belum mengikuti pelatihan kurikulum 2013 untuk mempelajari secara mandiri.

3. Guru

Guru hendaknya memilih metode atau media pembelajaran, guna bisa membuat siswa lebih menarik dan aktif dalam pembelajaran.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan, skripsi yang berjudul: “Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas”. Dan tidak lupa sholawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke luar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini, semoga kita mendapatkan syafaatnya dari yaumul akhir kelak.

Penulis menyadari, telah mencurahkan segala kemampuan dan usaha dalam menyusun skripsi ini, tetapi dalam skripsi masih terdapat kekurangan yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran. Dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat menambah keilmuan dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 24 April 2019

Penulis,



Septi Ayuningsih

NIM. 1423303066

IAIN PUR

DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, Shoni Rahmatullah. 2012. *The Power Of Rasulullah's Leadership*.
Jogyakarta: Sabil.
- Arismantoro. 2008. *Character Building Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter?*.
Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter
di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Azmi Nailul. 2017. *Manajemen Pendidikan Karakter Siswa MAN 1 Brebes Dan
sMAN 2 Brebes*. Tesis. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Chairunnissa Connie. 2017. *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Dalam Pendidikan
Dan Sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Daryanto. 2011. *Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran*. Yogyakarta:
Gava Media.
- Fattah Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
- Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan
Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.
- Hayat. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik : Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta:
Kencana.
- Herdiansyah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta:
Salemba Humanika.
- Hermino Agustinus. 2014. *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori,
dan Model*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kesuma Dharma, Cipi Triatna, dan Johar Permana. 2011. *Pendidikan Karakter
Kajian dan Tseori Dan Praktik di Sekolah*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
- Koesoema Doni. 2010. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman
Global*. Jakarta: Grasindo.

- Listyarti Retno. 2012. *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif*. Jakarta: Erlangga.
- M. Najib, Novan Ardy Wiyani, Solichin. 2016. *Proses Manajemen Strategi Untuk Membentuk Karakter Anak Usia Dini di TK Islam Al-Irsyad Purwokerto*, JPA, Vol. 17 No. 1.
- Mu'min Kholid. 2015. *Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Siswa Di SMK Ma'arif 1 Ajibarang*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Mulyasa. 2012. *Educational Leadership Mewujudkan Efektifitas Kepemimpinan Pendidikan*. Malang: UIN Malang Press.
- . 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Musfah Jejen. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Mengurai Krisis Karakter Bangsa*. Jakarta: Kencana.
- Muslich Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ningsih Tutuk. 2014. *Implementasi Pendidikan Karakter*. Purwokerto: STAIN Press.
- Nugroho Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul (Kasus Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Jembrana 2000-2006)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priansa, Doni Juni Dan Rismi Somad. 2014. *Manajemen Supervisi Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Prihatin Eka. 2011. *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Rahardjo Mudjia. 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: Maliki Press.
- Rohman Arif & Teguh Wiyono. 2010. *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohmat. 2010. *Kepemimpinan Pendidikan Konsep Dan Aplikasi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Rosyid Nur, dkk. 2013. *Pendidikan Karakter: Wacana dan Kepengaturan*. Purwokerto: Obsesi Press.

- Saptono. 2011. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter (Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis)*. Salatiga: Esensi Erlangga Group.
- Siswanto. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subandono dan Suryaman. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Teori dan Praktek*. Malang: Wineka Media.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra Uhar. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT. Rineka Cipta.
- Surahman Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Tehnik*. Bandung: Tarsito.
- Syafaruddin. 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman Husaini. 2006. *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo Agus. 2013. *Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah (Konsep dan Praktik Implementasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiyani, Novan Ardy. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter; Konsep Dan Implementasinya Di Sekolah*. Yogyakarta: Pedagogia.
- _____, Novan Ardy. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Iman Dan Taqwa*. Yogyakarta: Teras.
- _____, Novan Ardy. 2012. *Pendidikan Karakter dan Kepramukaan*, Yogyakarta: Citra Aji Parama.
- _____, Novan Ardy. 2012. *Teacher Preneurship; Gagasan & Upaya Menumbuhkembangkan Jiwa Kewirausahaan Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- _____, Novan Ardy. 2013. *Bina Karakter Anak Usia Dini; Panduan Oragtua & Guru Dalam Membentuk Kemandirian & Kedisiplinan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

- _____, Novan Ardy. 2013. *Membumikan Pendidikan Karakter Di SD; Konsep, Praktek, Dan Strategi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- _____, Novan Ardy. 2013. *Penerapan TQM Dalam Pendidikan Akhlak*, JJP, Vol. XXVII No. 2.
- _____, Novan Ardy. 2014. *Format Kegiatan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib di Madrasah Ibtidaiyah dalam Kurikulum 2013*. Insania. Vol. 19, No. 1.
- _____, Novan Ardy. 2015. *Konsep Pendidikan Karakter Menurut Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M. Pd*. Insania. Vol. 20 No.2.
- _____, Novan Ardy. 2016. *Kapita Selekta PAUD; Alternatif-Solusi Problematika Penyelenggaraan PAUD*. Yogyakarta: Gava Media.
- _____, Novan Ardy. 2017. *Perencanaan Program Kegiatan PAUD Responsif Gender*. Yin Yang. Vol. 12 No. 2.
- _____, Novan Ardy. 2017. *Perencanaan Strategi Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di TK Islam Al-Irsyad Purwokerto*. Al –Athfal Jurnal Pendidikan Anak. Vol. 3 No. 2.
- Zain, Abdul Wahab. 2017. *Strategi Pimpinan Madrasah Dalam Mengembangkan Karakter Siswa Di MTS Ma'arif Nu 1 Kebasen Kabupaten Banyumas*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Zuriah Nurul. 2011. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual Futuristik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zusnani Ida. 2012. *Manajemen Pendidikan (Berbasis Karakter Bangsa)*. Jakarta: Tugu Publisher.